



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : Ke-6
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.15 WIB s.d. 13.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (F-P.
GERINDRA), Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
bulan Mei 2023;
2. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI
Semester I Tahun 2022;
3. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024;
4. Lain-lain.
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
24 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
4 dari 12 orang Anggota
1. Ir. Sudjadi
2. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
3. Harvey B. Malaihollo
4. Djenri Al Ting Keintjem, S.H., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
3 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E.,
M.Si.
2. Ir. Sumail Abdullah

3. Sudewo, S.T., M.T.
4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
2 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
2 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
1 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. H. Boyman Harun, S.H.
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN

Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi)
beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.):

Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, hari Selasa, 6 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan beserta jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat kerja hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat *walafiat*.

Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 10 orang dan jumlah fraksi 6 orang 6 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka rapat kerja pada hari ini. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), rapat kerja kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan lain-lain.

**Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri yang kami hormati,**

Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan RKP Tahun Anggaran 2024 bersama dengan Kementerian, Lembaga, mitra kerja yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi tanggal 9 Juni 2023.

Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per 31 Mei 2023 adalah sebesar 31,26%. Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja ini, kami perlu mendapatkan penjelasan dari Menteri Perhubungan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, terkait agenda pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, masih terdapat 24 temuan dan 61 rekomendasi yang terdiri dari 7 temuan terkait pendapatan, 14 temuan terkait belanja barang dan jasa, dan 3 temuan terkait aset. Dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp7,082 triliun dari temuan tersebut yang mana memberikan kerugian cukup besar antara lain sebagai berikut:

1. Penatausahaan, kekurangan, dan keterlambatan penyetoran PNBPN pada beberapa Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Pembiayaan perawatan prasarana perkeretaapian pada Dirjen Perkeretaapian belum seluruhnya diperhitungkan dalam perhitungan PNBPN *Track Access Charge (TAC)*;
3. Kesalahan penganggaran belanja perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau *Infrastructure Maintenance and Operation (IMO)*;
4. Pekerjaan pengembangan angkutan masal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan *buy the service* dilaksanakan tidak sesuai ketentuan;
5. Kelebihan pembayaran pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja barang dalam lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Penetapan Kemenhub Nomor 197 Tahun 2020 tidak sesuai ketentuan.

Agenda berikutnya yang akan kita bahas pada rapat kerja ini adalah Rencana Kerja Pemerintah dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024. Dalam hal ini, pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dengan tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, pagu indikatif Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp38,077 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang transportasi, program dukungan manajemen dan program konektivitas.

Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai tema RKP Tahun 2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar belanja kementerian tahun 2024 diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat mendukung percepatan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur padat karya;

2. Perlunya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan, memperkuat sinergi antar pusat dan daerah, serta mendorong *stakeholders* untuk berpihak pada pengembangan infrastruktur konektivitas di daerah tertinggal untuk mengurangi keterisolasian;
3. Peningkatan penyelenggaraan tol laut guna mengoptimalkan konektivitas logistik sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil dan pulau terluar dalam rangka pemerataan dan kesenjangan ekonomi dan pembangunan ekonomi antar wilayah;
4. Perlunya mendorong partisipasi swasta dalam merancang percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, mengingat kebutuhan pembiayaan yang sangat besar, sementara ruang kapasitas fiskal sangat terbatas.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan beserta jajarannya agar dalam proses penyusunan pagu anggaran Tahun Anggaran 2024 dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikian pengantar dari kami.

Kami akan mempersilakan kepada Saudara Menteri Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 dan pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Untuk itu kepada Saudara Menteri, kami persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, dan
Salam Kebajikan.*

**Yang saya hormati dan saya banggakan Pimpinan Komisi V,
Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan
Rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan yang hadir pada hari ini,**

Tentu kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bisa mengikuti acara dalam keadaan sehat yaitu evaluasi APBN 2023, pembahasan pemeriksaan BPK 2022 dan rencana kerja 2024.

Apa yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi setelah dipikir merupakan hal-hal yang penting dan kami sepakat untuk dilakukan *improvement* baik itu poin 1 berkaitan dengan pelayanan, padat karya, lalu peningkatan SDM, peningkatan tol laut dan partisipasi swasta itu menjadi *spirit* yang kita lakukan. Juga temuan BPK berkaitan dengan PNBPN berkaitan dengan TAC dan IMO kereta api dan BTS, kita akan bahas.

Kita lihat di halaman 4, kita mendapatkan alokasi sebanyak 33,4 triliun, namun pagu itu mengalami rekomposisi, sehingga pagu terakhir adalah 33,4. Dari apa yang kita peroleh, memang terdiri dari PNBPN lalu SBSN, BLU, dan juga PHLN dan kita harapkan pagu-pagu ini bisa saling melengkapi dan kami berusaha untuk meningkatkan PNBPN, melakukan upaya peningkatan BLU dan secara intensif melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan dari PHLN.

Dalam *slide* 5 kami laporkan, Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V, bahwa dari anggaran 2023 Mei sudah 30%, kita sudah serap dan kita sudah menyerap 26% dan ini kita upayakan akan lebih baik dari tahun lalu, karena praktis kontrak-kontrak yang harus kita jalani sudah kita lakukan, bahwa penyerapan ini belum maksimal karena memang ada beberapa kerjaan yang harus kita percepat. Dari sisi Eselon I, ada satu kombinasi di mana darat 31%, laut 34%, udara 31%, BKT 35%, BPTJ 40% dan untuk itu kita lihat bahwa eselon yang masih di bawah rata-rata adalah di kereta api dan BPSDM.

Berkaitan dengan PNBPN, kita memang memiliki target yang lumayan besar yaitu 4,11% capaian melebihi target dari yang ditetapkan, kita sudah mencapai 3,7 triliun dan PNBPN ini Tusi dari apa yang kita lakukan akan *Insyah Allah* bertambah banyak. Juga berkaitan dengan BLU yang sebesar 13,4%, kita akan upayakan mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Tercatat pencapaian tertinggi pada Sekjen dan laut sebanyak 47% dan 58% dan ini semua kita upayakan akan berlangsung dengan baik.

Slide ke 7, kami laporkan bahwa PNBPN dan BLU saat ini mengalami fluktuasi tertinggi pada 2019 sebanyak Rp9 triliun. Namun demikian, kami akan upayakan pada tahun-tahun ini dan tahun depan akan bertambah lebih banyak. Lalu kami laporkan juga mengenai penyerapan PNBPN ini penting, karena memang selain PNBPN selain APBN, kita memiliki ruang untuk memanfaatkan baik PNBPN maupun BLU dan sekarang ini tercatat untuk PNBPN dan BLU sudah terserap kurang lebih 27% dan juga PNBPN sudah terserap relatif baik. Untuk PNBPN dan BLU yang tertinggi adalah di laut 31%, BPSDM 24%, udara 22%, darat 21% dan kereta api 13%.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi bahwa apa yang harus dilakukan dalam Tahun Anggaran 2023 itu adalah perencanaan yang sudah ada kita lakukan evaluasi. Bahkan beberapa kita lakukan *value engineering* agar bisa lebih efisien melakukan akselerasi program proyek. Jadi satu per satu kami secara bergantian bersama Eselon I dan II untuk meninjau

proyek-proyek tersebut. Dan secara detail kami melihat bahwa kualitas daripada belanjanya lebih efisien dan efektif, *monitoring* menjadi suatu upaya yang kita lakukan terus.

Slide 11, kami laporkan bahwa pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti rugi daerah dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lebih baik. Pertanggungjawaban APBN dilakukan dengan laporan keuangan, tidak terpisah dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini merujuk pada satu Undang-Undang 1 Nomer Tahun 2024 dan peraturan menteri dan PMK dan tentu kami laksanakan dengan upaya maksimal. Opini daripada Kementerian Perhubungan memiliki nilai *progress* yang meningkat tiap semester dan Kementerian Perhubungan mencapai tindak lanjut 85% meningkat dari 82% dibandingkan 2022. Dan oleh karenanya, *alhamdulillah*, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, tahun ini Kementerian Perhubungan mendapatkan WTP yang ke-9 dan ini kita dapatkan sejak 2013.

Dari pemeriksaan BPK memang masih ada banyak yang harus kita tindak lanjuti dan secara lebih lanjut kami sampaikan ada 61 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dari 2021, 12 upaya Kemenhub dan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kerja sama industri dunia kerja, 7 rekomendasi berkaitan dengan BMN dan juga bagaimana kita melakukan upaya penerapan transportasi darat dengan lebih baik dengan satu rekomendasi laporan keuangan dari *ASEAN Development Bank*, *loan* berkaitan dengan apa yang kita lakukan di Sulawesi Tengah.

Slide 14, kami laporkan bahwa tindak lanjut dari BPK itu yang harus kita lakukan adalah:

- Menerbitkan pemberitahuan LHP BPK RI;
- Melakukan pemantauan tindak lanjut dari UPT di daerah;
- Melakukan pembahasan intens berkaitan dengan tindaklanjut Eselon I;
- Melakukan pemutakhiran tindak lanjut tim BPK yang dilaksanakan setiap semester.

Lanjut, ke *slide* ke-16. Kami laporkan bahwa dalam pelaksanaan RPJMN, kita juga memberikan prioritas untuk melakukan Pemilu serentak, pemindahan IKN dan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Perhubungan juga telah menyelaraskan rencana tema kerja dengan melakukan transportasi yang inklusif berkelanjutan di mana anggaran infrastruktur diarahkan pada pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pemulihan ekonomi.

Pak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Kami sampaikan pula bahwa pagu indikatif 2024 terdapat penurunan, namun demikian, kita tetap optimis tren ini menjadi positif. Dan pemenuhan target KPI ini penting, yang mana RPJMN dan Renstra maka perlu dilakukan prioritas di tahun 2024 ini menyelesaikan target PSN, proyek nasional dan

proyek pro rakyat dan dukungan pada IKN seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi.

Halaman *slide* 9, 18, kami laporkan pula bahwa indikatif daripada 2024 yang dikeluarkan 10 April oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, dapat disampaikan anggaran 2024 adalah 38 triliun. Dan pagu dasar jenis dan selanjutnya, pegawai 4 triliun, Operasional 4 triliun dan juga non-operasional 29,8 triliun. Rincian pagu dasar dana komposisi rupiah murni 60% atau sebanyak 25% SBSN 9 triliun, PNBPN 3 triliun, BLU 1,6 triliun dan PHLN sebanyak 751 miliar. Sedangkan rincian pagu dasar program infrastruktur konektivitas sebanyak 67%, dukungan manajemen sebanyak 25% dan pendidikan vokasi sebanyak 7% atau sebanyak 2,4 triliun. Distribusi alokasi anggaran per Eselon I tertera disitu bahwa Dirjen Kereta Api sebanyak 9,6 triliun, laut 9,2 triliun, Perhubungan Udara 7,4 triliun, lalu darat 6,6 triliun, BPSDM 3,6 triliun, Setjen 669 miliar, BPTJ 331 miliar, BKT sebanyak 185 miliar, dan Irjen sebanyak 107 miliar.

Adapun *highlight* berkaitan dengan kegiatan Program Kerja 2024 di antaranya, adalah:

- Irjen, antara lain melakukan pemantauan terhadap upaya untuk mempertahankan WTP dan pengembangan aplikasi sistem informasi audit dan sertifikasi kompetensi manajemen audit;
- Setjen, selain melakukan *assesment* terhadap kompetensi pegawai, juga menyusun naskah ratifikasi perjanjian internasional dan juga kebijakan teknis berkaitan dengan infrastruktur transportasi;
- Darat, kita lakukan dukungan terhadap IKN, kita lakukan dukungan kepada BTS pada 10 kota dan keperintisan di banyak kota-kota.

Bapak-Ibu Pimpinan Dewan dan Komisi V yang saya hormati,

- Lalu, kereta api antara lain meningkatkan kapasitas, mulai melakukan perencanaan untuk IKN;
- Laut, antara lain melakukan intensifikasi tol laut dan perintis dan meningkatkan sarana bantu navigasi dan pemeliharaan informasi;
- Udara, kita antara lain mengintensifkan pembangunan bandara dan pembangunan kawasan strategis dengan menambahkan jembatan udara sebanyak 43 rute;
- BKT, kita memang lebih banyak melakukan riset-riset berkaitan dengan transportasi logistik, kebijakan transportasi perkotaan dan pengembangan konektivitas angkutan di daerah 3TP;
- BPTJ, yang berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya di Jabodetabek, kami minta untuk terus mengawal keselamatan dan keamanan;
- Lalu BPSDM, kami mengintensifkan vokasi dan sarana prasarana. Bahkan kami bekerja sama dengan beberapa universitas luar, mengadakan *double degree program* secara tahunan kita akan dan sudah menyekolahkan 20 siswa setiap tahun.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Kita juga melihat prioritas yang harus kita lakukan ke dalam 10 prioritas kegiatan. Yang pertama adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas. Kita tahu bahwa 2023-2024 adalah upaya kita untuk menyelesaikan supaya tidak ada hal yang tidak berguna, langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan keselamatan menjadi satu hal yang penting, oleh karenanya, kami selalu melakukan *campaign* terhadap itu semuanya. Transportasi publik menjadi harus kita lakukan, oleh karenanya kita melakukan ini sendiri juga mendorong swasta untuk melakukan upaya-upaya itu. SDM menjadi prioritas bagi kami, baik itu dilakukan pada BPSDM juga dari kementerian melakukan secara intensif.

Berkaitan dengan DPSP dan DPP tahun 2024 sesuai dengan rencana strategis pada 2024, 10 destinasi super prioritas sudah kita lakukan. Beberapa hal di Borobudur, Toba juga di Labuan Bajo dan NTB dan Sulawesi Utara terutama karena itu merupakan lima yang terdahulu relatif sudah kita lakukan semua. Dan kita juga membuka diri untuk dilakukannya PPP seperti yang Bapak sampaikan tadi, sehingga Capex yang harus kita lakukan pada bandara, pelabuhan dan kereta api berkurang. Dan kita juga membuka jalur internasional, kami berkoordinasi intensif dengan beberapa negara sahabat baik itu Arab Saudi, India, Korea dan Jepang sehingga itu bisa mendukung pariwisata nasional dan *alhamdulillah* kita diberikan tanggapan yang positif dari negara-negara sahabat.

Kami laporkan juga haji sudah berlangsung di Kertajati dan tahun ini ada 8.000 haji dari Kertajati dan sudah berlangsung beberapa *trip*. Dan Kertajati sudah dihubungkan pada beberapa kota internasional seperti Singapore dan Malaysia dan beberapa daerah di Indonesia.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Bahwa SDM menjadi suatu prioritas bagi kami, kami melakukan upaya prioritas nasional menyediakan Diklat sebanyak 26.000, lalu DPL sebanyak 106.000 dan Sarpras sebanyak 26 unit. Dari hal-hal tersebut, kita memang sangat *concern* berkaitan dengan IT dan kita juga memberikan beasiswa pada mahasiswa pada mahasiswa baik didalam maupun di luar negeri, dan kita tahu pada masa mendatang, anak-anak kita itu menjadi suatu modal bagi kita untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045.

Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Rencana perintis dan subsidi transportasi ini menjadi *concern* bagi kami, terdistribusi pada berapa lokasi 4,1 triliun itu di darat, di laut dan di udara dan juga di kereta api. Subsidi ini memang rada kurang sehingga kami harus melakukan realokasi terhadap dana-dana dari sektor yang lain. Dari DIPA kita mendapatkan 4,7, laut mendapatkan satu porsi yang sangat besar yaitu 3,2 terutama berkaitan dengan keperintisan dan tol laut.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Program pro rakyat, kita lakukan dengan intensif sesuai dengan anjuran Bapak Pimpinan dalam rapat-rapat terdahulu. Padat Karya kita lakukan di semua sektor dan melakukan upaya-upaya mendukung percepatan ekonomi di kota dan daerah 3TP. Kami juga melakukan Padat Karya di beberapa tempat dan secara garis besar, kita lakukan pada daerah-daerah untuk peralatan, untuk pembangunan sarana dan juga prasarana di simpul-simpul transportasi. Proyek PSN menjadi hal yang penting dan kita ada 36 PSN di mana proyek-proyek itu sudah kita lakukan dengan cermat, ada beberapa yang belum maksimal tapi kita masih ada 2 tahun, *Insy Allah* kita akan dapat menyelesaikannya dengan baik.

IKN menjadi satu prioritas karena merupakan visi misi Presiden dan oleh karenanya kami akan melakukan beberapa upaya pembangunan bandara VVIP, membangun Terminal A-B, merencanakan dulu ya kereta antar kota, kereta bandara dan pelabuhan wisata dan ini beberapa sudah kita koordinasikan dengan panitia. Pengembangan transportasi, tentu kita akan prioritaskan sebagai satu ekonomi yang berkelanjutan dengan *net zero emmission* dan kita utamakan menggunakan satu mekanisme pada darat ada ITS/*Intelligent Transport System* yang tentunya akan memberikan hal-hal yang baik dan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain di Indonesia. Beberapa hal sudah kami koordinasikan juga dengan negara sahabat, Singapore, Malaysia, Jepang, Korea, India, beberapa negara Timur Tengah sangat berminat untuk kerja sama di IKN.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,

Demikian *overview* dari kami. Semoga kami dapat melaksanakan. Mohon maaf apabila belum sempurna, kami mohon catatan-catatan agar dari catatan Bapak-Ibu sekalian bisa memberikan suatu maksimalisasi program.

Demikian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Menteri.

Penjelasan sudah disampaikan Saudara Menteri Perhubungan.

Selanjutnya akan kami persilakan kepada Anggota Komisi V untuk menyampaikan saran-saran dan pendapat. Perlu saya ingatkan bahwa ini

masih pembicaraan pendahuluan, nanti kita akan lebih banyak ke pendalaman dengan para Eselon I.

Untuk yang pertama kita akan persilakan kepada Bapak Ali Mufti. Pak Ali Mufti, siap-siap Pak Sudjadi.

F-P. GOLKAR (Dr. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri Perhubungan dan seluruh jajarannya,**

Terima kasih atas waktunya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri di depan kita semua. Yang pertama, saya memandang dan menyimak Indonesia dengan 10 prioritas nasional, tentunya kita sudah menemukan potret Indonesia yang lebih baik di sektor perhubungan ini. *Nah*, oleh karena itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan apa yang Bapak presentasikan itu dapat dilaksanakan tergambar secara baik di negara kita ini Pak Menteri, kita akan *support* itu. Tapi yang harus saya tanyakan ini adalah kenapa di Jawa Timur Dapil ini yang perlu, *enggak* muncul ya ini perlu dimunculkan, Pak Menteri.

Yang kedua, di Dapil saya itu, Pak Menteri, ada beberapa pelabuhan yang tentunya itu butuh *support* dari Dirjen Laut dalam rangka untuk memaksimalkan pergerakan ekonomi di sektor nelayan itu. Yang berikutnya di Dapil saya, Pak Menteri, itu ada *problem* yang sampai sekarang belum terselesaikan kaitannya dengan tanah kereta api, *enggak* tahu ini apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan Tupoksi Bapak apa *enggak*. Cuma kami mohon dibantu agar *problem* rakyat menghuni eks kereta api itu bisa diselesaikan sehingga tidak setiap saat datang ke rumah, ya itu saja persoalannya.

Yang empat, yang terakhir tahun 2024, Pak Menteri, kalau ada program ya kami dikasih Pak Menteri, jangan hanya di ini kan, Dapil saya itu Dapil VII Jawa Timur. Ya, karena itu PJO kayaknya sekarang juga belum muncul, mudah-mudahan segera direalisasikan, yang lain-lain apa itu, tentunya yang lain Pak Menteri, bisa di karena ini sudah mendekati pergerakan politik yang tentunya program kementerian yang berbasis daerah pemilihan tanpa mengurangi program strategis nasional, itu tentunya kami sangat tunggu.

Terima kasih, Pak Menteri. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Ali.

Pakde silakan, *enggak* Rakernas, Pak?

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Mas Ketua yang cakep dan Bapak-Bapak Wakil, Pak Menteri yang sangat-sangat saya hormati.

Para Dirjen,

Para Direktur dan sebagainya,

Kali ini saya tidak bertanya, karena ini hari penghabisan. Artinya apa, Pak sampai mumpuk nanti usulnya, *nek* besok *ndak* kepilih ya *ora ngerti*. Sampai berapi-api ngritik ini, tapi kalau besok *nggak* kepilih ya ngapain, cuma mendengarkan saja.

Jadi ada beberapa pendapat dan saran saya, Pak Menteri, barangkali ini saya kritik pada Dirjen-Dirjen dan Direktur sehingga nanti tahun berikutnya itu bagi yang kepilih itu semakin bangga dengan keberadaan Kementerian Perhubungan.

Jadi saya ikut *cawe-cawe*, Pak Menteri. Satu, salut saya kepada Pak Menteri, mungkin daerah lain belum, tiga kali ke Dapil, penyerahan bis ke Magelang dan Temanggung, pengobatan massal covid, *groundbreaking* tipe A Purworejo, hebatnya ini Dirjen Darat, Pak. Jadi saya tidak pernah, Pak Menteri itu ke daerah bersama-sama Dirjen Kereta Api, Dirjen Laut, artinya kami dilibatkan. Ya, ini aku kritik keras ini.

Terus kemudian Dirjen Laut. Selama ini tak pernah kontak, dikontak apalagi Kabalai-nya, saya *enggak* ngerti yang kaya apa. Mungkin pantai Purworejo tak ada pelabuhan, apakah tidak ada kreasi PKT itu direkayasa ditempatkan di laut selatan pada Dapil-Dapil yang punya Anggota Komisi V. Desa saja bisa, BUMDES itu ya diakal-akali, Kementerian PU juga bisa, rumah swadaya pembangunan desa-desa itu juga sebetulnya bukan Tupoksinya Kementerian PU.

Terus ini tentang PKT, saya mohon, Pak Menteri, PKT agar dikontrol. Kalau PKT misalnya di stasiun itu yang di PKT ini *opo? Wong* PKT *iki* Padat Karya Tunai untuk meringankan rakyat pada saat ekonomi kita baru tidak baik. Jadi sebagian besar peningkatannya PKT di Dirjen-Dirjen itu, menurut saya salah konsep, agak beda dengan PU.

Lalu Dirjen Udara, ah lumayan ini, Pak. Dirjen Udara saya membantu bukan dapil saya di Bandara Ngloram, direalisasikan sampai diresmikan dan *alhamdulillah* saya membukakan jalannya ke Gubernur, disetujui.

Nah, Dirjen KA Pak, Dirjen KA ini sesuatu yang aneh *bin* ajaib. Selama ini nggak ada Kabalai yang ketemu saya, ngomong saya pun kalau saya Kabalai KA Jawa Tengah. Tetapi kalau datang ke Jogja menemui PJKA rajinnya setengah mati, ini-ini kritik, Pak. PJKA itu di bawah *panjenengan*, *ojo* Kepala Balai rapat *sowan neng kono*, ini ini ini kritik. Jadi sampai 5 sampai 6 kali diganti pun, saya *enggak* tahu *sing ngganti sopo*, *alasané opo*, ini tolong Pak Menteri, Dirjen KA itu perlu diawasi betul-betul. Karena selama saya 10 tahun ini antara Direktur Perencanaan, saya boleh minta tunjuk Direktur Perencanaan? Bisa ngacungkan tangan, Pak Menteri, boleh? Direktur Perencanaan hadir *enggak*? Kalau Direktur *anu* Pembangunan, *nggak* ada 2 Direktur Perencanaan sama Pembangunan. Itu nggak pernah *gathuk*, semua programnya itu tidak pernah direalisasikan.

Terus misalnya ya dulu *launching* di Ambarawa yang *launching*, Pak Menteri, *enggak* ada itu. Survei Ambarawa ke Magelang itu rakyatnya geger *enggak* ada itu. Survei dari mana, Bantul ke Muntilan juga *enggak* ada itu. Saya mikir Pak Dirjen Kereta Api, tolong dua bagian itu harus dikendalikan yang sungguh-sungguh, supaya jangan hanya konsultannya misalnya saya Direktur Perencanaan, saya hanya milih orang-orang ITB, loh kalau di Semarang kan ada Undip, di Surabaya kan ada, di Jogja kan ada. Jadi gitu selama ini *gathuk* itu *mesti* konsultan dari ITB *tur wedok yo ming kuwi* terus, saya terpaksa agak keras ini. Karena ini sudah secara perang *brotoyuda* sudah *rubuhan* tinggal nunggu *duryudono* mati artinya tinggal nunggu siapa yang di antara kita itu lolos, dan saya semoga ini lolos.

Terus coba, Pak, kereta api itu, Pak Menteri datang meresmikan apa itu terminal A yang hebat tapi Dirjen KAI punya proyek lintas apa penyeberangan sebelah itu *enggak* pernah lapor, *enggak* pernah, saya juga *enggak* tahu kalau di sana ada lintasan sebidang. Pertanyaan saya kan itu sudah sesuai, kenapa *enggak* dijadikan satu? Berarti ini mohon maaf, ini perlu Pak Sekjen, hal-hal begini ini sudah baratayuda terakhir. Artinya, nanti sudah menteri baru, dari sekian ini mungkin siapa yang masih terus, belum tentu di Komisi V, tapi kita berharap sisa-sisa satu tahun ini bisa kita manfaatkan. Syukur janji-janji program 2023 ini sudah ditenderkan atau paling tidak, Agustus itu sudah mulai sehingga September-Desember kita bisa *nunut* untuk kampanye.

Saya kira itu, Ketua. Saya mohon maaf, Pak Menteri. Terus terang saya dengan kereta api agak sangat kecewa, Kepala Balainya ganti *ping* lima kali loh Pak *enggak* pernah nongol, coba *sampean* hitung mulai sebelumnya Pak Doktor itu terus siapa ganti lagi, diganti juga *enggak* tahu sebabnya, apakah promosi? apakah ini, apakah ini. Pak Sekjen, betul-betul saya mohon lah manajemen Dirjen Kereta Api diawasi dengan ketat.

Terima kasih.

Sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pakde.

Ini jarang-jarang, Pak Sudjadi, agak keras ya kan, Pak? Jadi harusnya diatensi Pak Menteri.

Selanjutnya kami persilakan ke Pak Sudewo, siap-siap Pak Muhammad Aras.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V yang saya hormati.
Pak Menteri Perhubungan yang saya banggakan dengan seluruh jajaran
Eselon I, Eselon II dan semua yang hadir,**

Karena ini merupakan satu pendahuluan dan ringkasan dari apa yang sudah berjalan di tahun 2023. Saya tidak akan memberikan sesuatu yang detail Pak, saya, hanya memberikan satu masukan-masukan supaya bisa menjadi perbaikan barangkali kalau itu dipertimbangkan sebagai masukan oleh Pak Menteri.

Dalam penyusunan RKA K/L Tahun 2024, hendaknya mengakomodir, merespon segala dinamika yang telah terjadi yang merupakan itu menjadi kewenangannya Kementerian Perhubungan. Yang pertama adalah soal isu keselamatan di jalan raya. Akhir-akhir ini kan keselamatan menjadi sorotan, karena terjadinya banyak kecelakaan dengan fatalitas tinggi. Yang sering terjadi itu adalah bis pariwisata dan angkutan barang, Pak. Kecelakaan itu pasti diidentifikasi oleh namanya KNKT, rekomendasi KNKT itu pasti *detail* dan harapan kami itu bisa dijadikan satu pedoman untuk menyusun program kerja kedepan agar kecelakaan fatalitas tinggi utamanya di kemudian hari bisa diatasi melalui program-program di Tahun Anggaran 2024. Itu masukan secara umum saja Pak Menteri. Tapi kalau saya melihat kinerja Menteri Perhubungan saat ini sudah cukup bagus, angka kecelakaan menurun, ya artinya keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas itu naik. Tapi meskipun itu menurun tentu tidak bisa terus kita abaikan adanya kecelakaan itu, akan lebih baik kalau masih ada upaya untuk menurunkan kembali, sudah bagus tapi saya minta untuk ditingkatkan.

Saya mengapresiasi kepada Menteri Perhubungan yang telah membentuk Badan Kebijakan Transportasi, kalau *enggak* salah badan ini baru gitu ya, Pak Menteri ya, ini terobosan yang sangat bagus. Karena tidak mungkin kebijakan Menteri Perhubungan yang telah berjalan itu tahu, apakah kebijakan tersebut sudah benar, sudah tepat, aplikatif sesuai harapan masyarakat, memberikan pelayanan transportasi darat laut udara perkeretaapian sesuai harapan masyarakat atau tidak, tanpa dilakukan suatu evaluasi.

Jadi, Pak Menteri itu sangat bagus membentuk badan kebijakan ini. Saran saya hanya supaya Badan Kebijakan Transportasi ini dalam menjalankan fungsi dan perannya itu secara optimal lah, Pak, melakukan identifikasi secara keseluruhan, pokok-pokok persoalan, isu-isu tentang transportasi itu, sehingga evaluasinya lebih cermat dan menjadi rekomendasi untuk menyusun program dan kebijakan berikutnya. Seperti masalah ODOL, bagaimana evaluasinya, bagaimana kebijakannya, ada rumor yang mengatakan kalau ODOL dihentikan nanti akan terjadi inflasi, tapi kalau dijalankan terus, dibiarkan terus akan merusak jalan dan menimbulkan kecelakaan. *Nah*, ini sesuatu yang dilematis tetapi jawabannya tentu akan lebih ilmiah kalau itu dilakukan sebuah kajian.

Kemudian ada isu juga masalah tiket pesawat udara yang tinggi, pada rute penerbangan yang jauh itu harga tiketnya murah tapi rute penerbangan yang rendah, yang pendek harganya tiketnya murah. Kemudian untuk pesawat dengan Boeing yang besar itu harga tiketnya murah, tapi dengan pesawat kecil misalnya ATR jaraknya pendek tapi harga tiketnya mahal. Ini juga akan tepat kalau dilakukan kajian, Pak, sehingga rekomendasinya juga ilmiah apa yang harus dilakukan, supaya hal demikian tidak terjadi, keluhan masyarakat tentang keluhan harga tiket yang mahal.

Kemudian juga sarana dan prasarana Kementerian Perhubungan baik darat, laut, udara, perkeretaapian itu jumlahnya banyak dan menyebar di wilayah-wilayah, di titik-titik seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bagaimana pakai moda transportasinya, bagaimana perjalanannya, bagaimana situasi kondisi moda transportasinya. Itu tidak mungkin akan bisa dipantau di monitor oleh Kementerian Perhubungan, oleh pusat dengan cara manual atau konvensional. Ini semua pasti harus menggunakan teknologi. Jadi *update* teknologi itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana perjalanan kapal yang ada di tengah laut misalnya tol laut dan yang lainnya, bagaimana situasi kondisi bis pariwisata di jauh dari perkantoran, bagaimana kondisi angkutan barang yang jauh kondisinya, semuanya pasti membutuhkan teknologi, Pak. Jadi saya berharap teknologi ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan tercermin dalam program maupun pengalokasian anggaran. Jadi studi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terhadap bagaimana manajemen transportasi di negara-negara maju yang sesuai dengan situasi kondisi di Indonesia itu menjadi suatu yang penting untuk dilakukan, Pak.

Kemudian saya juga yang terakhir, BTS/*Buy the Service*, tidak masalah program *buy the service*, bis-bis di perkotaan yang 10 perkotaan itu dijalankan kalau memang itu betul-betul dilakukan pengkajian, karena semangat

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bagaimana mewujudkan transportasi umum, Pak, *public transportation*. Jadi kita sudah siapkan sarana prasarananya. Yang angkutan darat berupa jalan raya, yang kereta api itu sarana perkeretaapian, pelabuhan dermaga dan semuanya. Tapi bagaimana supaya semuanya itu bisa dimanfaatkan secara optimal dengan ukuran yang jelas yaitu terwujudnya *public transportation*, Pak.

Nah, yang saya lihat kami lihat, *buy the service* ini perlu melakukan suatu kajian. Apakah betul bahwa bis tersebut itu jumlah penumpangnya banyak? apakah betul sesuai yang diinginkan masyarakat? ataukah keduanya kosong tetapi itu berjalan? Itu dievaluasi saja. Saya tidak menolak ini, saya bukannya tidak setuju, tapi lebih baik kalau itu dilakukan evaluasi kajian bagaimana supaya *buy the service*, bis-bis ini dimanfaatkan secara optimal, karena anggarannya juga cukup banyak. Saya setuju saja kepada Pak Menteri, tapi bagaimana itu dilakukan evaluasi.

Yang terakhir Pak, saya kemarin itu kan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur kebetulan ada kegiatan di sana. Di Berau itu ada penerbangan sebelum covid cukup bagus. Karena memang di sana daerah yang potensi baik wisata maupun tambang dan merupakan satu daerah yang jauh dari kota-kota besar yang lain. Jadi transportasi yang mudah dijangkau itu adalah dengan transportasi udara. Tapi sebelum covid ini bagus, Pak, tapi setelah covid pada saat covid ini berhenti dan setelah covid, tolong ini dinormalkan kembali. Ini titipan saja dan kemarin saya sudah sampaikan kepada Bu Dirjen Udara juga dan katanya Bu Dirjen Udara akan di cek, mudah-mudahan ini memberikan harapan besar bagi masyarakat di sana. Karena kebetulan banyak sekali, Pak, warga kami dari Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, Pati dan Grobogan itu berada di sana kerja di sana, kaki lima, Pak, pedagang-pedagang gituloh tapi dia cukup lumayan lah sudah termasuk bagus kehidupannya, jadi saya bermain kesana kemarin.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sudewo.

Selanjutnya saya persilakan ke Pak Aras dan siap-siap Pak Boyman Harun.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta dengan Eselon I, dan
Seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,**

Pertama-tama, tentu kami mengapresiasi hasil WTP yang kesembilan, Pak, mudah-mudahan selanjutnya tahun depan lagi yang kesepuluh. Jadi sudah genap sepuluh kali dan kepemimpinan Kementerian Perhubungan luar biasa bisa menghadirkan prestasi yang tentu kita banggakan di Komisi V.

Yang kedua adalah terkait dengan capaian sampai per Juni ini. Saya melihat cukup lumayan bagus, hanya saja di kereta api yang baru beberapa persen, kurang lebih 13% ini perlu perhatian. Saya perlu tahu apa permasalahan utamanya karena hampir setiap tahun di kereta api selalu terendah baik di semester pertama maupun di akhir tahun selalu realisasi yang terendah. Mohon konfirmasi dari Pak Menteri, apa yang menjadi kendala utama sehingga ini bisa terjadi terus menerus.

Yang selanjutnya adalah kami hampir setiap minggu berada di Dapil terutama di Bandara Sultan Hassanudin Makassar. Saya selalu *mengimpikan* bahwa Bandara Sultan Hassanudin sudah selesai proyek pengerjaannya. Ya, tahun kemarin kami dikonfirmasi dijanji untuk dimulai tahun 2023 untuk diselesaikan, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk penyelesaian. Mohon ini jadi perhatian agar tentu sisa masa jabatan Presiden Jokowi tahun 2024 ini bisa dituntaskan Pak Menteri, agar tentu tidak ada hal-hal yang ditinggalkan yang tentu bisa mengurangi sedikit keberhasilan dari pemerintahan yang ada saat ini.

Termasuk juga program kereta api yang di Sulawesi Selatan. Ya, kami berterimakasih sudah diresmikan oleh Pak Presiden bersama dengan Pak Menteri, jalur Maros-Barru. *Nah*, ini kan nomenklaturnya kemarin dari Makassar sampai Parepare. Mohon ini menjadi perhatian agar untuk program tahun 2024 ini diprioritaskan lagi untuk penyelesaian ini, tinggal sedikit dari Makassar kemudian di Parepare. Dan ya mudah-mudahan di Pemerintahan Jokowi tidak meninggalkan lagi kereta api ini, karena ini sudah tahun terakhir yang tentu menjadi penting bagi kita untuk menyelesaikan seluruh yang tertunda.

Kemudian yang selanjutnya adalah ini kecelakaan yang sering terjadi di mana-mana khususnya di Sulawesi Selatan banyak disebabkan karena fasilitas keselamatan dan lampu jalan tidak memadai di beberapa ruas jalan nasional. Oleh karenanya, mohon menjadi perhatian di tahun 2024 ini menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan terutama Dirjen Darat agar ini direalisasikan sehingga betul-betul kinerja kita bisa terlihat bahwa Pemerintahan Jokowi 10 tahun bisa memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat.

Kemudian yang terakhir, karena ini masih dalam suasana pemulihan ekonomi masyarakat. Ya, kami berharap juga padat karya tetap menjadi prioritas untuk penganggaran tahun 2024. Ini dimaksudkan untuk bagaimana tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan akibat pandemi kemarin. Mudah-mudahan setelah tahun 2024 tuntas, masyarakat sudah pulih seperti biasa sehingga trauma akibat dari pandemi 19 bisa terobati.

Dan yang terakhir, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri adalah terkait dengan beberapa pelabuhan di Sulawesi Selatan yang sangat strategis tapi belum disentuh seperti di Kabupaten Barru Pelabuhan Garongkong ini mohon menjadi perhatian sehingga perekonomian di daerah itu bisa cepat pulih dan bisa berkembang seperti pelabuhan-pelabuhan sedianya yang ada di luar Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Selatan itu sendiri, di mana ini akan menjadi penyangga dari Parepare, lalu kemudian bila di Makassar terlalu padat bisa juga menjadi penyangga sehingga hubungan antara IKN *Insyah Allah* akan datang bisa lebih lancar bila Garongkong ini dikembangkan. Kemudian yang tentu yang menjadi pertanyaan besar kami adalah terkait dengan fasilitas yang ada di IKN, sejauh mana komitmen Pak Menteri untuk menyelesaikan seluruh program-program yang ada dan ini periode terakhir, apakah seluruh program ini bisa diselesaikan dalam satu penganggaran atau *multiyears*.

Barangkali itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Aras.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya. Jadi benar Pak Menteri tanggal 15 nanti kita akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Makassar termasuk di bandara udara Hasanuddin. Itu Kunker kami yang ketiga sejak bandara ini mangkrak, tanggal 15 Juni ini, Pak. Jadi nanti kami sudah jadwalkan tanggal 15 Juni dan ini Kunker yang ketiga di bandara tersebut. Kami paham bahwa itu wilayah AP/Angkasa Pura, tapi mohon agar supaya Pak Menteri memberikan perhatian khusus atau memberikan penyampaian kepada AP untuk segera memaksimalkan penyelesaian pekerjaan bandara tersebut.

Selanjutnya Pak Boyman Harun dan siap-siap Pak Hamka BKD.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.**

Pada hari ini saya tidak banyak memberikan apapun berkaitan evaluasi pelaksanaan APBN. Yang jelas menurut saya Menteri Perhubungan dan Kementerian Perhubungan ini baik yang sudah maupun yang akan datang sudah tidak diragukan lagi perencanaannya maupun hasil evaluasinya, kita apresiasi. Cuma yang paling penting di ujung-ujung masa jabatan kami ini tentu tetap kami berjuang untuk memberikan arahan kepada Kementerian Perhubungan terutama berkaitan dengan masalah pemerataan dalam hal pembangunan di 2024, Pak. Saya pikir pemerataan ini perlu dievaluasi sehingga kue-kue pembangunan ini tidak saja diprioritaskan kepada hal-hal yang sudah memang diprioritaskan seperti 10 prioritas yang Bapak sampaikan tadi. Tetapi daerah-daerah yang lain, tentu sangat memerlukan juga walaupun tidak menjadi prioritas utama, tetapi memerlukan perhatian karena masih banyak kekurangan-kekurangan baik darat, laut maupun udara. Jadi itu yang pertama.

Kedua, saya menyarankan kepada kementerian untuk selalu mengevaluasi terhadap rencana kerja yang akan datang maupun yang sudah dilaksanakan. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan kepada Bapak Menteri berkaitan dengan masalah pembangunan pelabuhan feri yang ada di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, pembangunan pelabuhan feri Bangka Belitung. Sampai sekarang saya tidak melihat ada perubahan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh kementerian. Karena pelabuhan tersebut sudah hampir 10 tahun barangkali mangkrak tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, sementara bangunan sudah selesai. Dan saya sudah sampaikan kemarin, menurut sumber yang saya dapat itu perencanaan yang salah karena pembangunan pelabuhan feri itu berada di tengah-tengah alur sungai. Kemudian berkaitan dengan kekuatan pelabuhan juga tidak memenuhi syarat. Dan yang paling utama menurut saya di Bangka Belitung-nya sendiri belum ada pelabuhan ferri-nya, Pak, yang ada baru di Ketapang-nya di Kalimantan Barat sehingga pelabuhan tersebut tidak dimanfaatkan karena kapalnya tidak ada merapat. Jadi itu maksud saya evaluasi dan pengawasan harus tetap selalu dilaksanakan. Karena percuma juga dengan perencanaan yang bagus, kemudian hasil juga yang bagus, tetapi evaluasi pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik.

Kemudian, Pak, berkaitan dengan IKN. Dari semua kementerian termasuk Perhubungan maupun PUPR, di sini kan selalu diutamakan berkaitan kelanjutan-kelanjutan IKN, artinya anggaran-anggaran itu kelanjutan IKN itu

diprioritaskan. Ke depan maksud saya, evaluasi dan *progress*-nya juga harus disampaikan kepada Komisi V ini seperti apa sudah IKN itu? Karena kita sering mendengar permasalahan IKN ini tidak pernah lepas dibicarakan setiap saat. Tetapi tidak semua masyarakat itu mengetahui atau tahu tentang sudah seperti apa pembangunan yang di IKN itu? *Enggak* pernah kelihatan, nggak pernah dilaporkan progressnya dan apa lagi evaluasinya. Jadi maksud saya sesuai dengan anggaran yang banyak dimasukkan ke sana dalam rangka untuk kelanjutan daripada IKN ini, masyarakat wajib tahu seperti apa perkembangan. Karena kita dengar banyak cerita, IKN ini bisa-bisa *enggak* jadi gitu atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun. Tapi menurut saya hal ini harus jelas pemerintah untuk memberikan keputusan berkaitan masalah IKN ini. Kita tidak mau anggaran yang begitu besar yang sudah dikeluarkan masyarakat tetapi tidak ada kepastian dalam rangka pembangunan IKN ini. Ada yang mengatakan kalau seandainya Presiden-nya ganti IKN-nya belum tentu bisa dilanjutkan. Jadi *statement* pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini, sehingga apa yang dianggarkan oleh kementerian ada suatu kepastian, tidak menjadi cuma-cuma atau bahkan hanya simbol belaka. Jadi siapapun Presidennya, menurut saya pembangunan Indonesia ini harus tetap berlanjut, apalagi itu memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini. Jadi saya pikir itu perlu penjelasan agar masyarakat benar-benar memahami, tidak ada kebingungan apalagi kerancuan berkaitan masalah pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur itu.

Berkaitan selanjutnya, Pak Menteri. Saya tetap mengusulkan pertama, masalah pembangunan terminal bandara Kabupaten Ketapang kemudian *runway* di Kabupaten Ketapang menurut saya sudah sangat tidak memenuhi syarat. Semoga pelaksanaan itu di 2024 harus tetap dilaksanakan berkaitan dengan masalah terminal penumpang dan *runway*-nya. Kemudian yang tidak kalah penting juga, mohon kepastian berkaitan dengan bandar udara Kayong Utara, Kalimantan Barat. Seperti apa nasibnya, menurut saya, pemerintah harus mengeluarkan satu kebijakan yang benar-benar bisa diterima seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kayong Utara.

Saya pikir itu saja, Pak. Saya berterimakasih kepada Kementerian Perhubungan yang sudah banyak memperhatikan saran dan pendapat kami terutama saya di Kalimantan Barat. Tinggal ada sedikit-sedikit yang belum, Pak, termasuk halte sungai, halte sungai tolong diperhatikan, Pak, di 2024 atas usulan yang telah kami sampaikan agar terlaksana, Pak, agar terlaksana. sehingga daerah kami yang mayoritas sungai itu bisa memanfaatkan sungainya dengan baik, aman dan nyaman sehingga masyarakat terhindar dari masalah bahaya-bahaya seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan.

Demikian, Pak Menteri, demikian, Pimpinan.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Boyman.

Selanjutnya Pak Hamka, siap-siap Pak Anwar Hafid.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati dan saya banggakan,
Pak Menteri dan seluruh jajarannya,**

Ada beberapa hal, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya. Sulawesi Selatan itu, Pak Menteri, saya kira masyarakat Sulawesi Selatan tahu betapa besar anggaran yang diturunkan di sana mulai pembangunan bandara, kereta api dan sebagainya cukup besar. Tentu masyarakat Sulawesi Selatan menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Itu yang pertama, Pak Menteri.

Yang kedua, kalau saya memperhatikan pagu dan realisasi anggaran, Pak Menteri. Pagu awalnya dan sampai pagu akhir ini tidak berkurang, malah bertambah ya, pagu awalnya 33,14 walaupun ada *automatic adjustment*, saya kira *automatic adjustment* ini adalah rupiah murni barangkali, Pak Menteri ya? sehingga blokir *non-automatic* juga ada, tetapi ada penambahan Rp1,35 T dan pada akhirnya pagu akhir dari kementerian ini adalah 34 lebih. Artinya ada penambahan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, ini yang saya baca dalam laporan Bapak.

Pertanyaan saya adalah saya dengar ada beberapa kegiatan yang dikurangi padahal di sisi lain anggaran tidak berkurang, posnya saja yang berkurang, satu yang dalam bentuk SBSN misalnya, satu dalam bentuk rupiah murni ya. Saya ambil contoh saja, pengurangan program misalnya di sektor laut. Ada renovasi pelabuhan Bonerate yang sudah dianggarkan awal dari 11 turun menjadi 8, dengar-dengar turun lagi menjadi 1. Padahal ini sudah disepakati semua, tolong ini menjadi perhatian, apa yang menjadi masalah. Ini di Kabupaten Selayar, Pak Menteri, setahu saya itu *alhamdulillah* di Kabupaten Selayar itu sudah cukup banyak, terima kasih sekali. Cuma ada satu proyek yang dikurangi besar-besaran, padahal masyarakat sudah siap-siap untuk memanfaatkan itu, karena ini adalah renovasi pelabuhan laut yang terpengaruh atau akibat daripada gempa bumi kemarin.

Saya minta menjadi perhatian dan catatan ini, Pak Menteri, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah, kalau saya memperhatikan anggarannya malah bertambah, *kok* ini dikurangi. Itu kira-kira catatan saya dari sisi penganggaran, Pak Menteri, yang lain-lain saya kira *running well* saja. Cuma kami dorong untuk mempercepat karena posisinya masih 31 atau 30% masih

cukup jauh, yaitu sisa 6 bulan ini Pak Menteri, mudah-mudahan kita manfaatkan dengan baik sisa anggaran yang masih tersedia.

Selanjutnya, mengenai temuan. Saya juga menyampaikan tentu kita harus bangga dan berterimakasih kepada seluruh kita semuanya, apakah itu DPR utamanya kepada jajaran Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Dan kita dengar juga tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam rekomendasi dan beberapa catatan yang disampaikan oleh BPK. Tapi di sini, Pak Menteri, harus kita hati-hati benar, terdapat 24 temuan dan 61 rekomendasi itu adalah pekerjaan rumah kita semuanya. Jangan sampai ada rekomendasi, ada temuan yang tidak bisa kita tidak lanjut. Kalau rekomendasi dan temuan itu tidak bisa ditindaklanjuti akan berakhir pada pidana. Ini mohon perhatian sekecil apapun, tapi saya yakin dan percaya bahwa temuan-temuan itu *Insyah Allah* bisa dilaksanakan baik. Hanya *warning* saja, jangan sampai rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK itu tidak bisa dilakukan tepat pada waktunya dan pada akhirnya membawa apa namanya nama baik kita semuanya bisa rusak.

Itu mengenai temuan, walaupun saya tahu disampaikan oleh Pimpinan tadi kerugian negara 7,082, jangan masuk pada kerugian negara karena itu hanya mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kaget-kaget juga kalau dikatakan kerugian negara. Ini adalah temuan, Pak, yang harus kita benahi dan kita harus buktikan bahwa tidak ada kerugian negara dalam temuan itu. Itu pekerjaan Pak Menteri dan seluruh jajaran, harus kita buktikan termasuk kami di DPR tentu mendorong semua supaya *clean and clear* terhadap itu.

Yang ketiga Pak Menteri, kedepan anggarannya saya lihat pagu indikatifnya Rp38 triliun. Catatan saya, saya belum mendalami secara detail. Catatan saya yang pertama tentu juga arahan Presiden bahwa semua proyek-proyek yang bisa terselesaikan pada tahun 2024, itu kita tuntaskan secara tuntas benar sehingga tidak membawa akibat pada masa transisi kepemimpinan Republik Indonesia dan termasuk masa transisi kepengurusan atau keanggotaan kami di Komisi V ini. Kami juga tidak mau, melihat mitra kerja kami tidak berprestasi pada akhirnya nanti.

Oleh karena itu, Pak Menteri, saya belum detail benar mengenai program yang akan datang. Semua yang perlu diselesaikan segera diselesaikan. Tetapi kalau masih memerlukan *multiyear*, saya pikir kebijakan Presiden tidak perlu dulu *multiyears*, sampai akhir tahun 2024 saja kita bahas dengan catatan bahwa program-program tahun 2024 itu paling tidak pada akhir pembahasan, sisa hari ini, sisa anggaran ini saja periode kami akan membahas anggaran itu. Tentu saya garis bawahi apa yang diharapkan oleh Pakde Djadi tadi bahwa mudah-mudahan kita-kita disini masih terpilih di masa yang akan datang tentu atas dukungan program-program yang sifatnya padat karya dan berharap kepada seluruh jajaran yang ada di bawah, apakah itu Satker, apakah itu kepala balai agar supaya tidak terlalu seakan-akan menyepelkan teman-teman Anggota, bahkan agak sulit dihubungi ya, saya katakan agak sulit dihubungi. Contohnya misalnya semenjak pergantian Kepala Balai Kereta Api tidak pernah pun satu kali pun ketemu bahwa sudah terjadi pergantian di sana,

Pak Menteri, dihubungi pun saya tidak tahu juga nomor hp-nya. Itu sama apa yang disampaikan Pak Sudjadi tadi, ayo mari kita sama-sama mengakhiri transisi masa jabatan Presiden dan tentu masa jabatan kami. Mudah-mudahan ke depan masih kita diberi kesempatan kesehatan untuk bisa berbuat banyak kepada daerah pemilihan kita masing-masing.

Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Hamka.

Iya, indikasi kerugian negara Pak, belum. Kalau nggak diselesaikan tentunya menjadi kerugian negara.

Selanjutnya Pak Anwar Hafid, kami persilakan. Saya ingatkan bahwa masih ada 9 orang penanya dan ini masih pembicaraan pendahuluan. Semoga teman-teman Komisi V bisa mengefektifkan waktu untuk menyampaikan pendalamannya, terima kasih Pak. Silakan Pak Anwar.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
salam sejahtera buat kita sekalian.

**Bapak Para Pimpinan, Para Anggota Komisi II Komisi V yang saya muliakan,
Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan,**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, baik terkait dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan laporan hasil kegiatan. Kemudian yang kedua juga ada saran ada usulan Pak Me

Yang pertama, menyambung apa yang disampaikan Pak Hamka tadi soal laporan hasil pemeriksaan BPK. Mungkin kita saya minta dari 61 rekomendasi ini mungkin rinciannya, Pak, supaya bisa kita lihat sehingga bisa kita lakukan pendalaman lagi, apa-apa dan kita bisa mendapatkan informasi tentang rekomendasi-rekomendasi yang cukup besar, kurang lebih sekitar 40 miliar itu. Pak, ini temuan administrasi atau temuan apa supaya lebih jelas, Pak.

Nah, yang kedua berkaitan dengan penerbangan perintis ya, Pak. Kita tahu persis bahwa beberapa waktu lalu Susi Air sudah membatalkan juga operasinya. Kemudian sebelum itu Merpati, Nusantara Airlines juga sudah

resmi dibubarkan. Saya hanya ingin mendapatkan informasi bagaimana program Kementerian Perhubungan soal penerbangan perintis ini. Karena memang daerah-daerah kita Indonesia secara geografis yang kita tahu bahwa sangat membutuhkan penerbangan perintis ini.

Kemudian selanjutnya saya juga ingin mendapatkan informasi tentang langkah-langkah konkrit dari kerisauan dan pertanyaan dimana saja kita pergi Pak Menteri soal mahalnya harga tiket yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi. Ini perlu juga kami ketahui sehingga kita bisa memberi penjelasan apa sesungguhnya yang menjadi persoalan seperti disampaikan tadi. Ada penerbangan lama waktunya tapi harganya harga tiketnya lebih murah daripada penerbangan yang waktunya sangat singkat tapi harganya sangat mahal. *Nah*, kemudian, itu yang pertama, yang kedua.

Yang selanjutnya, Pak Menteri, ada beberapa usulan khususnya di Dapil saya di Sulawesi Tengah. Yang pertama berkaitan dengan program tahun 2023 soal lampu penerangan jalan, Pak. Saya setelah banyak kali turun di lapangan, saya melihat ada hal yang penting tapi mungkin ini secara teknis nanti, Pak, tapi usulan saja ini apa bisa atau tidak. Bahwa setelah pasca bencana beberapa hunian tetap itu dibangun di Kota Palu. Tapi ada satu sarana prasarana, Pak Menteri, yang tidak tersedia itu adalah lampu penerangan jalan di Huntap-Huntap itu. Mungkin ini perlu dipikirkan, ini saya kira yang paling mendesak, ini kalau atau saya tidak tahu anggaran dari mana tapi ini perlu karena ini juga bagian dari upaya kita dalam rangka membantu pemulihan pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau penerangan jalan yang program ini khusus di jalan nasional, saya tidak tahu apa atau bisa dialihkan atau gimana, Pak. Yang penting, yang pasti ini adalah sesuatu yang sangat prioritas dibutuhkan oleh masyarakat untuk lebih menggenapi seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana tersebut.

Nah, yang berikutnya, Pak Menteri, saya juga ingin menyampaikan soal berkaitan dengan posisi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Kita melihat bahwa dalam konteks dalam fungsi sebagai bandara *hub* juga bandara *hub* di beberapa bandara yang ada di Kota Sulawesi Tengah. Saya lihat contoh misalnya, Pak, tatanan kebandarudaraan ini saya belum paham betul tapi saya ingin pertanyakan. Sekarang ini contoh, dari Bandara Sis Al-Jufri itu, Pak, ke Morowali dan ke Bandara Luwuk Banggai itu hanya satu kali seminggu, Pak, kalau Morowali satu kali sehari, tapi yang lebih banyak itu Makassar-Morowali, Pak, Makassar-Banggai. Sementara, kalau kita lihat bahwa sebetulnya penerbangan Jakarta-Palu itu juga tidak ada bedanya waktunya dengan Makassar.

Nah, ini saya tidak paham ini soal tatanan kebandarudaraan kita, apakah itu memungkinkan, Pak, memungkinkan maskapai bisa mengatur itu? sehingga misalnya yang penumpang-penumpang yang mau ke Sulawesi Tengah melalui Bandara Morowali, Bandara Luwuk itu ini bisa diatur *enggak*, Pak, sehingga mereka harus melewati Bandara Sis Al-Jufri gitu. Ini yang menjadi *problem* karena kita contoh dari Bandara Sis Al-Jufri ke Banggai itu hanya sekali dalam seminggu Pak, sehingga ini tidak ada orang nanggung Pak,

tidak ada kepastian. Ini mungkin kami sarankan untuk bisa ditambah sampai mungkin 3 kali seminggu sehingga ada kepastian bagi penumpang kalau tiba-tiba batal masih ada waktu lain yang bisa dicadangkan untuk itu.

Nah, ini kemudian yang kedua saya laporkan ke Pak Menteri masih ada dua bandara di Morowali di Sulawesi Tengah yang sama sekali belum ada penerbangan yaitu Bandara Kasiguncu yang di Poso dan Bandara Pogogul di Kabupaten Buol, itu yang sama sekali belum ada penerbangan sampai hari ini, Pak Menteri. Saya kira ini perlu mendapat perhatian karena anggaran yang besar itu tidak kita sudah menyelesaikan fisiknya tapi kita butuh juga dimanfaatkan oleh masyarakat, dirasakan oleh masyarakat hasilnya.

Saya kira demikian, Pak Menteri.

Terima kasih.

*Wallahu musta'an,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Anwar.

Selanjutnya kami persilakan ke Pak Sumail, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Sumail, Pak Iqbal dan Ibu Irine. Tanggal 4 Juni, 3 orang Pak yang ulang tahun di Komisi V, semoga Bapak semakin sukses dan semakin cemerlang dan bersinar ke depannya.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan atas ucapan doanya terhadap ketiga orang yang kebetulan sama-sama berulang tahun, yang ke 27 ini, Pak.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota,
Pak Menteri beserta segenap jajaran,**

Melihat dan mendengar beberapa paparan tadi, tentu pertama saya apresiasi terhadap capaian-capaian setelah dilakukan atau dicapai oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2023 ini.

Yang kedua, tentu saya juga memberikan catatan-catatan, Pak, kaitannya dengan temuan-temuan BPK. Ada sekian 61 dan ini harus menjadi titik perhatian serius di tengah kita mendapatkan WTP yang kesembilan, tentu ini bisa mendorong untuk lebih meningkatkan dari sisi pengawasan. BPK menunjukkan catatan kaitannya dengan pengelolaan PNBP di sektor laut, di sektor transportasi maksud saya, komunikasi dan jasa. *Nah*, kiranya bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan karena PNBP ini begitu penting, Pak,

apabila kita optimalkan maka akan memberikan sumbangsih besaran terhadap APBN berikutnya. Di samping itu juga, kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan *project* agar kita mengurangi ketergantungan terhadap APBN murni itu. *Nah*, maka di beberapa tempat misal karena kurangnya pengawasan, masih ditemui di pelabuhan-pelabuhan adanya pungutan-pungutan liar. Sulit mungkin kita buktikan, namun itu begitu nyata dan ini tugas dan PR kita. Itu yang ketiga, Pak.

Berikutnya kaitannya dengan RPJM kita bahwa ada target-target yang saya kira karena kita sudah mau menuju 2024, Pak. Catatan kami dari, ini untuk pelabuhan penyebrangan tadi ya. 36 target untuk tahun 2024 baru terealisasi 15 sampai tahun 2022. Masih mungkinkah ini, Pak, kita capai sesuai dengan RPJM kita? Dan juga pelabuhan-pelabuhan utama itu juga masih kurang dari apa yang kita targetkan. Maka dalam rentang waktu yang sangat sempit ini kurang lebih satu tahun, dari sisi perencanaan, penganggaran dan pemograman itu harus betul-betul kita upayakan untuk mengarah kepada sasaran dan target itu.

Pak Menteri, saya terima kasih kalau tadi Pak Djadi menyampaikan bahwa ada beberapa atau Eselon I atau Pak Menteri sendiri belum pernah barangkali ke tempat Pak Djadi. Tapi karena tempat Dapil saya itu salah satu penyebrangan terbesar kedua di Indonesia, jadi Ketapang-Gilimanuk *alhamdulillah* Pak Djadi, kami sudah dua kali kalau tidak salah dan memberikan dampak yang sangat positif, Pak, terhadap kinerja mereka karena mereka para aparatur disana dan kemudian mitra-mitra strategis merasa dapat perhatian. sehingga itu menunjukkan kerja berikutnya yang lebih baik dan terus meningkat karena mereka merasa diawasi dan diperhatikan.

Namun demikian, ada beberapa persoalan juga kaitannya dengan di dapil saya lagi, Pak, di pelabuhan Ketapang. Ada persaingan yang tidak sehat kaitannya dengan calon-calon pengguna jasa, maksud saya truk yang akan masuk ke kapal-kapal yang akan menyebrang baik ke Bali maupun dari Ketapang ke Lembar. Karena disitu sebelum masuk ke Pelabuhan, masih ada penyedia-penyedia transportasi, maksud saya penyedia kapal-kapal itu, sebelum masuk ke pelabuhan di *stop* dulu, Pak, dan diarahkan kepada kapal-kapal yang mau menyebrang sehingga ada beberapa kapal yang juga kemudian tidak mendapatkan muatan dan memberikan insentif kepada supir apabila menggunakan kapal si A maka akan dapat insentif dan ini tidak sehat, Pak, untuk perkembangan transportasi yang ada disana. Kalau di pelabuhan Merak-Bakauheni, saya belum pernah melihat, tetapi di Ketapang ini sudah pernah diupayakan katanya oleh KSOP dan beberapa *stakeholder* yang ada di sana, namun masih ada kerumitan-kerumitan seperti itu.

Yang berikutnya selain *appreciate* tadi, Pak, tentu kalau saya cerita Dapil agak sedikit kecewa lah ya, kenapa kecewanya? Kami dulu pernah meninjau pelabuhan Kalbut untuk dilakukan perluasan maupun pembangunan. Namun, kami hingga dua tahun mau masuk tiga tahun disini, Pak, tidak ada, seperti itu. Perencanaannya dimaksud, alasannya DED dan lain-lain sebagainya. Yang kedua di Pelabuhan Panarukan yang dibangun 2014,

kebutuhannya sangat mendesak sekali karena ada tiang pancangnya yang saya dengar sudah retak gitu loh, Pak. Perlu direnovasi dan direhabilitasi segera agar dermaga yang sudah kita bangun itu tidak sia-sia. Karena Situbondo potensi untuk tambang batunya yang mungkin nanti bisa digunakan untuk persiapan pembangunan di IKN itu luar biasa dan ini akan mengungkit mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Situbondo.

Berikutnya, Pak Dirjen Kereta Api, kami dulu pernah, bukan dulu lah beberapa bulan yang lalu pernah berdiskusi agar reaktivasi, Pak, rel kereta api yang di Bondowoso karena letak Bondowoso ini kurang menguntungkan secara geografis, terisolir dan tidak dilalui jalan nasional, tentu apabila diaktifkan kembali rel kereta api itu akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi di sekitar sana.

Saya kira itu, Pak, catatan dan masukan dari saya.

Matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih Pak Sumail, bertambah usia tapi tetap kelihatan lebih muda ya.

Ibu Novita, silakan Bu, siap-siap Pak Ruslan.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Langsung saja. Hasil WTP-nya sudah sampai 2021 sudah 9 kali ya, Pak Menteri ya? Berarti 2022 sama 2023 kan WTP lagi ya, Pak, ya berarti sudah 11 kali WTP itu luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri dan jajaran, semoga bisa mempertahankan dan semakin baik. Kalau ada yang tidak baik ya segera diberesin, saya percaya pasti bisa memperbaiki hal-hal yang kurang.

Kemudian realisasi, Pak, tadi 31,26% ya harapannya ini karena awalan, jadi harapannya nanti di akhir bisa serapannya maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya dan sehingga program yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik pastinya, karena kita Komisi V, saya secara pribadi dan semuanya pasti mendukung program dari kementerian.

Kemudian temuan BPK, Pak, minta ya segera dan *Insyah Allah*, Pak Menteri dan jajaran pasti punya solusi untuk bisa segera menyelesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan, itu.

Kemudian cerita tentang Dapil *aja* dulu Pak, tentang Dapil. Beberapa saat lalu saya dicurhatin tentang BTS di Banyumas, ini mungkin ada Pak Hendro, waktu lebaran saya ditemuin, katanya ada tunggakan beberapa bulan sehingga itu membebani para pengusaha *transport* lokal. Jadi dalam momen ini saya minta tunggakan itu bisa segera diselesaikan karena saya *enggak* ngerti sistem bayar BTS itu gimana. Karena kemarin ceritanya dibiayai dulu oleh lokal tetapi macet beberapa bulan sehingga mereka sampai bingung *gitu*. Apakah dibayar didepan apa memang sistemnya dibayar belakang *gitu*, yang pastinya itu di Banyumas jadi minta tolong untuk bisa segera diselesaikan sehingga tidak membebani pengusaha lokal.

Kemudian di Cilacap Pak Menteri sudah berapa tahun itu pelabuhan minta pengerukan, tapi katanya kan memang kebijakannya belum kesana, ya siapa tahu nanti ke depan ada karena itu sangat diharapkan untuk bisa mempermudah sandar kapal-kapal.

Bandara, Pak Menteri dan Pak Novie. Kemarin sudah banyak dibantu dan sekarang kepalanya kan ganti, minta tolong program yang kemarin diusulkan bisa dibantu realisasi. Walaupun tidak ada beroperasi tapi kan jangan sampai mangkrak *gitu*, tidak ada fasilitas yang membaik.

Kemudian loncat lagi ini, ingat bandara yang kejadian kecelakaan kemarin, Pak. Minta tolong sekali jangan sampai ada kejadian yang seperti itu lagi yang sampai ada perempuan meninggal 3 hari itu. *Nah*, itu standarnya tolong sekali bisa lebih maksimal kemudian petugas-petugasnya juga baik CCTV kemudian pengamanan, keamanan, kebersihan dan semuanya itu harus aware dengan hal-hal yang begitu. Jadi minta tolong sekali standard-standarnya itu harus dimonitor, Pak Menteri sama itu kan kejadian yang sangat memprihatinkan, pastinya kita tidak mau itu terjadi. Makanya ya itu tadi saya secara manusiawi menyampaikan itu minta tolong sekali untuk bisa menjadi perhatian yang sangat ekstra *gitu*. Ya, pastinya tidak hanya di bandara tapi di tempat-tempat lainnya juga, tapi ini contohnya adalah di bandara.

Kemudian kereta api ya, saya ingin tanya tentang kereta api cepat sih, Pak, karena kan jarang ketemu *gitu*. Ngelihatnya kan hanya di media di itu saya juga *enggak* pernah WA sama Pak Dirjen, apalagi Pak Menteri takut ngeganggu lah ya tanya-tanya *gitu*, mumpung rapat ya sekilas mungkin bisa bagaimana progresnya *gitu*. Kemudian kalau kereta api pasti kecelakaannya kita berharap palang pintu saja lah, saya sudah 10 tahun ngomongnya palang pintu melulu karena disitulah titik rawan adanya kecelakaan, orang-orang yang naik mobil atau motor yang kadang-kadang mereka main ada, sudah dekat saja mereka masih nekat-nekat. Tapi kalau ada palang pintu *gitu* kan itu meminimalisir kecelakaan, koordinasinya dengan siapa wewenangnya ya silakan lah dibantu *gitu*.

Kemudian Pak Menteri, terakhir mengenai proyek strategis nasional. Di 2023 ada PSN, di tahun sebelumnya juga ada PSN *gitu*. Jadi momen ini juga kita saya berharap PSN yang sekarang bisa tercapai tapi yang tahun-tahun berikutnya juga di tercapaikan *gitu*, Pak. Jangan sampai tahun ini ada PSN lagi tapi yang tahun kemarin ada beberapa yang belum tercapai lagi lah. Ini tolong dievaluasi dan dikejar, mana yang menjadi prioritas dan sudah menjadi PSN dari Pak Presiden dan pemerintah ya minta tolong dilaksanakan.

Nah, tadi terakhir, ini adeknya terakhir. Tentang kegiatan padat karya, padat karya pastinya tadi karena ini tahun politik kita berharap padat karya bisa dimaksimalkan lagi untuk kita berkegiatan di Dapil. Bahkan kalau bisa selain padat karya mungkin ada kegiatan FGD atau Bimtek untuk masyarakat di mana itu manfaat untuk sosialisasi dan lain sebagainya.

Itu saja Pak Menteri, nanti kan pasti akan ada rapat selanjutnya.

Terima kasih, Pak Menteri, jajaran, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu.

Lanjut, Pak Ruslan, siap-siap Pak Willem Wandik.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh teman-teman Komisi V,
Yang kami banggakan Bapak Menteri dan seluruh jajaran,**

Pertama, kami mengapresiasi dan terima kasih atas capaian Bapak Menteri selama ini yang sungguh luar biasa dengan seluruh para perangkat-perangkatnya yang telah membuat terobosan-terobosan yang sangat luar biasa untuk bangsa kita.

Yang kedua adalah Bapak Menteri sekedar untuk mengingatkan, sebab ini adalah masih pendahuluan. Apa yang Bapak Menteri lihat sudah beberapa kali Bapak Menteri kunjungi ke Provinsi Aceh, mungkin Bapak Menteri bisa memprioritaskan apa yang kira-kira Bapak Menteri sudah janjikan di hadapan para tokoh masyarakat Aceh yang ada di Provinsi Aceh. Terutama adalah kunjungan yang kemarin kita ke Banda Aceh yaitu Dermaga Ulee Lheue itu di depan Bapak PJ Gubernur dan juga seluruh kepala-kepala dinas kemarin yang hadir dan juga para tokoh, itu masyarakat Aceh sangat mengharapkan tindak lanjut untuk tahun 2024.

Dan seterusnya adalah mengenai yaitu Bandara Malikussaleh dalam rangka untuk pengembangannya sampai saat ini dan juga sudah berapa kali kita suarakan, Bapak Menteri. Maka dalam hal ini untuk ke depan tahun 2024 itu jangan ditinggalkan lagi, harus diprioritas apa yang Bapak Menteri janjikan mengenai peremajaan *runway*-nya, pematangan lahan, pagar dan juga perluasan itu area parkir.

Seterusnya adalah Bapak Menteri yang sudah kita coba kemarin yaitu perjalanan kereta api dari pada Krueng Geukueh ke Kutablang, itu Kabupaten Bireun. Mungkin Bapak Menteri sudah kita rasakan dan sudah kita saksikan bersama-sama itu perlu ditindaklanjuti dan juga perlu disempurnakan sesuai dengan judul, yaitu kereta api Bireun dan Lhoukseumawe. Maka harapan kami untuk tahun depan ini bisa Bapak Menteri akomodir apa yang sudah Bapak Menteri lihat sendiri beberapa minggu yang lalu ataupun bulan yang lalu.

Mungkin itu saja, Bapak Menteri.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq Ila aqwamit thoriq,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Walaikumsalam.

Pak Willem Wandik, silakan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Baik.

Pak Ketua dan rekan-rekan Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan Pak Menteri serta seluruh jajaran yang kami hormati,

Dari kami, pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN 2023. Tentu kami juga memberikan apresiasi atas kinerja pada semester pertama ini.

Dan yang kedua terkait dengan pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI, kami juga memberikan apresiasi atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian. Dan kami ingin memberikan catatan sedikit pada laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II/2022, ada sejumlah rekomendasi diharapkan supaya dapat ditindaklanjuti atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK.

Berikut pada pendahuluan RKA dan K/L 2024 sesuai dengan tema RKP 2024 dimana mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di mana salah satu kebijakan dan prioritas kegiatan Kementerian Perhubungan RI adalah mendukung pemerataan pembangunan nasional, membantu masyarakat ekonomi lemah dan menyentuh daerah terpencil,

terluar dan terdepan serta membuka keterisolasian daerah melalui pemberian subsidi PSO dan angkutan perintis tol laut dan jembatan udara. Terkait dengan hal ini memang kami, Dapil kami memang masuk dalam kategori 3T itu, oleh karena itu kami selalu mengharapkan sentuhan dari pusat melalui Kementerian Perhubungan karena di Dapil kami memang akses transportasi dari dan ke itu, transportasi udara selalu menjadi prioritas. Seperti halnya di sini untuk Kabupaten kami Tolikara dan juga di Mamberamo Tengah, Yahukimo, Lanijaya, Nduga dan Pegunungan Bintang itu jadi prioritas. Ya sekarang mungkin lebih kecil, kalau tadinya besar agak luas, karena dengan adanya DOB baru lebih terbatas.

Dan juga adapun bandara perintis atau lapangan terbang yang perlu dilakukan perbaikan. *Runway* terkait pengaspalan maupun pagar bandara dan mulai mengalami kerusakan. Yaitu ada sejumlah bandara tapi yang menjadi fokus kami Bandara Karubaga, Mamit, Bokondini, Kanggime, Wari dan Douw. Sebenarnya di situ ada 15 bandara tapi yang selama ini menjadi perhatian kami hanya 6 bandara itu.

Dan yang kedua terkait dengan pelaksanaan program pro kerakyatan dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui skema padat karya pemberdayaan masyarakat yang perlu penambahan program padat karya di dalam pemberdayaan masyarakat khusus di kabupaten kami yaitu Tolikara di sektor transportasi berupa pemeliharaan, perawatan, pelayanan prasarana dan sarana transportasi udara.

Dan selain itu, pada kesempatan ini kami juga mengingatkan kepada Pak Menteri dan serta seluruh jajaran bahwa karena kita sudah memasuki tahun politik sehingga ada kebijakan-kebijakan atau program-program yang dapat mempengaruhi konstituen kami atau yang dapat melemahkan posisi kami atau kata lain jangan sampai ada program-program atau kebijakan-kebijakan yang membuat kami kehilangan muka di Dapil kami, di mata konstituen. Karena itu kami harap supaya bisa menjadi kerja sama yang baik, saling koordinasi supaya kami juga tetap eksis dan bisa berjumpa kembali pada Pemilu mendatang.

Sekian.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih, Pak Willem.

Pak Djenri, silakan Pak Djenri.

F-PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.):

Makasih atas kesempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan, Anggota, dan
Pak Menteri Perhubungan,
mitra rapat kita pada hari ini,**

Kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dan jajarannya dimana memperoleh WTP dan disamping ini merupakan prestasi, tapi kami juga menganggap ini sebagai kewajiban sebagai aparaturnegara penyelenggara pengguna anggaran negara. Kami ucapkan selamat Pak Menteri.

Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan karena pada beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman yang lain meminta ada usulan untuk pembangunan bandara, *runway* dan segala macam untuk menunjang apa perhubungan udara. Kami beberapa waktu yang lalu, Pak Menteri, mungkin ini sudah menjadi PR ke daerah perbatasan utara dengan Philippines termasuk ke Sangihe dan Sitaro di Siau, banyak sekali permasalahan yang kami temui disana, yang pertama masalah pelabuhan penyeberangan disana. Karena ternyata di sana sebabnya banyak pelabuhan penyeberangan tapi fungsinya tidak difungsikan sebagaimana mestinya, tidak difungsikan lagi sehingga kapal-kapal penyeberangan yang ada di sana itu kebanyakan menggunakan pelabuhan-pelabuhan laut yang umum sehingga tidak pas kalau kapal penyeberangan itu sandar di pelabuhan umum, itu pertama, ada beberapa pelabuhan yang kami temui di sana. Itu yang perlu mungkin diperhatikan dan kami pergi dengan kepala balai ke sana.

Yang kedua, yang sudah menjadi PR juga disana masalah operasional pelabuhan di Siau yang sudah berapa kali tertunda-tunda peresmiannya, sementara bandaranya sudah *ready* sudah siap, segala proses sudah siap termasuk bantuan dari APBD Kabupaten di Sitaro itu, bantuan dari APBD lewat Ibu Bupati dan kami meninjau langsung di sana sudah *ready* bagus, dan masalahnya sekarang terancam rusak karena bandaranya itu belum bisa dioperasionalkan. Kami meminta kepastian, memangnya ada peraturan atau ada undang-undang yang mengatur kalau belum diresmikan tidak boleh digunakan dioperasionalkan. Sementara rakyat di sana itu dengan kami melihat potensi ekonomi itu pala terbaik di dunia ada di sana dan di sana memang produksi pala yang paling besar ada di Indonesia. Saya kira ekonomi mereka cukup dan mereka sudah menantikan kapan bandara ini dioperasionalkan? Saya bilang nanti saya laporkan ke menteri. Karena tidak ada aturan yang saya tahu kalau tidak diresmikan kemudian belum boleh dioperasionalkan. Ya, walaupun hanya kurang lebih berapa menit 29 atau 30 menit dari Manado. Tapi katanya sudah ada negosiasi dengan pihak perusahaan penerbangan, mereka minta bagaimana Pemda mau tanggulangi berapa persen dari penerbangan itu, cukup tinggi sekali, *enggak* tahu prosesnya sekarang dengan Susi Air kalau bisa sudah jalan sehingga kami meminta kepastian, ada salam juga dari Pak Gubernur tentang masalah ini dan Ibu Bupati di sana. Kami mohon penjelasan agar supaya itu cepat ya, masyarakat sementara menunggu itu.

Yang kedua, Pak Menteri, masalah kewenangan kementerian itu jalan yang harus dipasang lampu jalan sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan. Jangan cuma cepat bertindak karena ada temuan umpamanya Presiden ke Mandalika, dia bilang kan jalan disana gelap, baru cepat ditindaki, diambil langkah-langkah yang untuk pasang lampu disana. Ya, itu karena Presiden, kalau kita ini Anggota Dewan atau masyarakat biasa, apakah *enggak* sama sehingga kami minta perhatian lagi sebagaimana yang sudah diusulkan oleh Kepala Balai Perhubungan Darat disana. Dia sekarang ini, Pak, hampir setiap hari dia berkoordinasi dengan saya, bahkan dalam kunjungan kerja saya ke daerah-daerah perbatasan selama beberapa hari ada dia ikut terus, termasuk desainnya untuk Danau Tondano. Karena kan disana dari 10 destinasi KSPN salah satu masuk, ada *event* internasional tahun ini di sana dan dia sudah mendesain bagaimana Danau Tondano itu bisa diberdayakan dengan banyak *multiplayer effect*-nya nanti.

Mungkin sudah ada masukan ke Pak Menteri, mungkin Pak Dirjen juga nanti saya dengar akan kesana untuk melihat kelanjutan itu KSPN. Termasuk Likupang, karena Likupang itu salah satu daerah yang menjadi pusat wisata juga nanti Likupang. Pak Jokowi sudah sampai ke sana Pak Presiden kita, sehingga saya lihat anggaran di pelabuhan Likupang itu jangan cuma sampai di pelabuhannya, jangan cuma sampai di merenovasi. Saya lihat di 2024 itu sudah ada perencanaan untuk itu, ya jangan cuma hanya anggaran rehabilitasi saja. Khusus Danau Tondano ya tidak perlu sama lah dengan Danau Toba yang hampir Rp2 triliun, tapi kalau diberdayakan sesuai usulan dari kepala balai di sana saya kira itu sesuatu yang luar biasa karena saya termasuk dari daerah sekitar di situ. Jadi saya cukup tahu tentang permasalahan ini.

Mungkin ini hal-hal yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih, Pak Pimpinan, terima kasih perhatian Pak Menteri dan jajarannya.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih, Pak Djenri.

Bu Cen Sui Lan.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan jajaran,**

Pak Menteri, saya bulan lalu reses ke Kabupaten Lingga difasilitasi mitra Komisi V dengan kapal, jadi bukan dengan jet-nya, Pak Menteri. Saya sampai di sana, Pak Menteri, harus naik pong-pong untuk mengunjungi desa-desa dan itu sudah biasa dilakukan masyarakat. Saya naik pong-pong kapasitas 20

orang diisi 25 orang, kondisi hujan dan itu biasa anak-anak sekolah pakai pong-pong itu, Pak Menteri. Begitu susahnya masyarakat kami, Pak Menteri, untuk mendapat pendidikan, untuk mendapat hidup layak *aja* harus seperti itu.

Jadi kalau bicara pemerataan, saya rasa kami ini sangat tidak mendapat pemerataan. Pak Menteri, saya mohon disediakan diadakan roro mini, roro mini itu untuk anak-anak sekolah untuk masyarakat yang bisa menampung manusia dan logistik dalam skala kecil. Mungkin solusinya bisa Pak Menteri berikan bagaimana agar dapat bantuan seperti itu. Saya ini tidak minta kereta api, Pak Menteri, di tempat saya itu laut lebih banyak daripada darat. Saya minta pemerataannya, Pak, anggaran-anggaran besar itu dialihkan kepada kemampuan kepada untuk masyarakat saya. Contohnya dermaga-dermaga itu *udah* pada rusak, perlu perbaikan, halte laut dan juga penerangan. Pak Menteri, 50% masyarakat saya tidak mendapat listrik. Saya perlu spesial untuk penerangan, mengapa? Listrik itu hanya hidup 1/3 malam, jadi perlu sesuatu yang lebih spesial, Pak Menteri, mungkin anggaran-anggaran besar itu bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.

Juga Pak Menteri, saya mendapat kunjungan dari Wakil Bupati Natuna. Wilayah kerja KSOP itu kan masih bergabung dengan Anambas, Natuna itu sudah besar, saya sudah berkunjung, itu kantor wilayah kerja itu sangat tidak memadai, lebih bagus toko *photocopy* saya, Pak Menteri. Dan itu sudah harus dipisahkan karena sangat mengganggu proses untuk masyarakat nelayan itu, mengapa? nelayan-nelayan itu kan perlu surat-surat untuk untuk berlayar. Jadi kalau mereka mengurusnya ke Anambas ke Tanjung Pinang sangat menghabiskan waktu dan energi. Jadi mohon Pak Menteri tolong dibantu kita.

Juga Pak Menteri, tiga tahun yang lalu, saya minta dermaga apung dengan Pak Dirjen Darat yang lama, Pak Budi. Saya diberikan surat, disurvei setelah tiga tahun saya tanya masyarakat, masyarakat jawabnya sudah dibangun kepala, ekornya belum. Jadi tolong nanti bantu saya mengecek, Pak Menteri, mungkin itu harus diselesaikan.

Dan yang terakhir Pak Menteri, Pak Menteri berkunjung ke Aceh dengan Pak Ilham naik heli disuguhin durian Pak Menteri ingat terus. Nanti saya kirimin durian Pak Menteri, supaya Pak Menteri ingat terus ke saya, ya Pak Ilham ya? Pak Menteri?

Itu saja dari saya.

Terima kasih, Pimpinan semua.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih, Bu Cen.

Pak Ilham Pangestu, silakan.

F-P. GOLKAR (ILHAM PANGESTU):

Assalamualaikum,

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pak Menteri bersama seluruh Anggota yang hadir hari ini,

Tadi sebenarnya sudah ditanya semua sama teman-teman. Cuma saya mau nanya tadi kebaca tadi saya *kok* tema prioritas dan kebijakan RKP tahun 2024, halaman 16 itu *kok* di kementerian ini *kok* ada arah kebijakan RKP tahun 2024 nya ada pelaksanaan Pemilu 2024. Ini apa urusannya Kementerian Perhubungan dengan pelaksanaan Pemilu di 2024 ini? apa kegiatannya sehingga masuk dalam kebijakan prioritas ini, Pak.

Yang kedua saya melihat rencana dukungan Kementerian Perhubungan destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas ini di antara 10-nya ini salah satunya tidak ada Aceh ini, Pak. Karena saya perwakilan dari Aceh, ini saya bilang *kok enggak* ada Aceh *nih* di antara 10 ini *nih*. Kan di Aceh ada Danau Laut Tawar, ada Sabang bahkan ada Simeuleu yang tiap tahun itu kepala daerahnya membuka lomba selancar dan para pesertanya yang hadir dari seluruh negara berbondong-bondong karena ombaknya di situ sangat beda daripada di negara lain pada tahun yang tertentu, Pak. Ini di antara 10 ini saya lihat belum ada ini Aceh, mungkin ini Perpres atau Kepres, Pak ya, tapi kalau misalnya tidak ada juga mungkin, ya ada lah pembangunan-pembangunan kecil-kecil untuk menyentuh untuk pemerataan pembangunan dari pihak kementerian, Pak.

Ini ini saja mudah-mudahan di kita masih panjang berjalan estafet ini untuk menggodok anggaran 2024 karena di tahun-tahun penghujung mudah-mudahan Aceh menjadi juga prioritas dalam di Kementerian Perhubungan.

Ini saja, Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Wa'alaikumsalam.

Makasih, Pak Ilham.

Pak Eddy Santana, silakan Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V,
Menteri Perhubungan beserta jajaran yang sama saya hormati,**

Saya terima kasih, Pak Pimpinan, saya *enggak* daftar tapi diberikan kesempatan gitu ya, tapi kesempatan ini tentu akan saya pakai juga.

Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih, Pak Menteri. Bandara Silampari itu sudah sekarang sudah terbang Batik itu tiap hari itu, yang dulu setelah habis covid kan kita meragukan itu *gitu*. Kita mulai dua kali seminggu, tiga kali seminggu, sekarang tiap hari, Pak, banyak juga dari sekitarnya terutama jamaah umroh gitu memanfaatkan itu ya ke Jakarta dulu dia dari Lubuklinggau, sangat membantu sekali. Terima kasih, Pak.

Nah, PR kita justru yang kedua yang berbatasan dengan Palembang, Bandara Way Kanan ya Way Kanan, kalau tidak salah dulu saya bingung juga *kok* ada Sumsel, Gatot Soebroto ternyata itu sebenarnya di Lampung. Tapi sangat dekat dengan Sumatera Selatan, Martapura *gitu* sekitarnya, Oku, Oku Timur dan sekitarnya. Kalau itu juga difungsikan, karena itu bandara kepunyaan militer di Puslabpur ya untuk latihan tempur disitu. *Nah*, saya ingin dengar juga bagaimana itu kondisinya kerjasamanya dengan militer, apakah itu sudah bisa *gitu* ya Kementerian Perhubungan untuk memanfaatkan untuk penerbangan sipil juga ini penting, karena jauh itu dari Palembang. Dan kalau kita mau buka pariwisata ke Danau Ranau, *nah*, itu dari situ lah paling dekat. Kalau dari Palembang ke Danau Ranau itu bisa 8 jam gitu ya bahkan 9 jam, tapi kalau dari Way Kanan dari bandara itu ya hanya paling lama 2 jam gitu. *Nah*, sehingga Danau Ranau bisa hidup, Danau Ranau itu cantik sekali besar gitu ya, Danau terbesar kedua di Pulau Sumatera *gitu* ya yang wilayahnya 3 Provinsi kalau nggak salah, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu sedikit ada di Danau Ranau. *Nah*, ini Pak Menteri jadi perhatian kita gitu mungkin kedepan bagus sekali kalau itu beroperasi *gitu* ya Bandara Way Kanan.

Nah, kemudian, Pak, ini kan semakin dekat ya ini yang terakhir ya semakin dekat dengan Pileg atau Pilpres. *Nah*, kami ini juga punya kepentingan pendekatan dengan konstituen *gitu* ya untuk 2024. Saya mengusulkan itu, Pak, tentu teman-teman juga sependapat gitu ya, program itu sudah selesai di Oktober, Pak. Jadi kan kita bisa dengan gagah juga kita ke daerah-daerah konstituen, *nah* itu *tuh* sudah ada *tuh* program kita, lampu jalan misalnya penerangan jalan umum itu masuk desa bisa masuk mana *nah* itu Oktober itu sudah kalau bisa sudah dibuat surat keputusannya, Pak. Jadi bermanfaatlah untuk kami semua, kita kan Pilegnya di bulan Februari *gitu* lah. Tapi kalau ini programnya ya di SK-nya di bulan Maret apa ke atasnya di 2024, ini kurang manfaatnya bagi Pileg, bagi kami yang ikut lagi *nih*, Pak, untuk pencalonan legislatif *gitu* ya.

Saya kira ini, Pimpinan, kita ngerti lah Pak Menteri tuh, kita kan mitra, mitra itu sama saja pacar, Pak. Jadi kalau ekstrimnya pacaran kita ini, mitra itu, saya kira mohon dukungan bantuan.

Terima kasih.

Saya juga akan memberikan ini, Pak, sedikit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak, silakan, silakan Bu, Bu Cen. Pak Anwar, silakan Pak. Pak Willem? Pak Willem? *enggak ada? enggak ada yang mau diserahkan?*

Tinggal dua orang ini, Pak Syahrul Aidi atau Pak Irwan dulu?

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Irwan, Irwan.

KETUA RAPAT:

Pak Irwan dulu? Silakan, silakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabakaratus.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V, serta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan, Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen, Pak Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, Direktur dan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang hadir pada rapat kerja hari ini,

Pertama-tama, saya mau apresiasi ya pencapaian WTP 2021 melalui audit BPK, ini juga menasbihkan 9 kali Kementerian Perhubungan berturut-turut. Ini tentu upaya dan etos kerja yang tinggi dari Kementerian Perhubungan untuk mencapai WTP 9 kali ini dan kami mengapresiasi kerja-kerja keras Kementerian Perhubungan. Namun, kami tetap mengingatkan agar 61 rekomendasi ini segera dicari bagaimana upaya penyelesaiannya.

Yang kedua, terkait *logistic performance index* yang dirilis Bank Dunia tahun 2023. Di situ kita kemudian anjlok ya 17 peringkat dari peringkat 46 di tahun 2018 kemudian turun menjadi peringkat 63 di tahun 2023. Ini tentu sangat berpengaruh kepada tingginya biaya logistik ya yang merupakan berpengaruh pada daya saing nanti industri manufaktur kita termasuk berpengaruh pada tingginya biaya terkait perekonomian negara kita.

Nah, saya lihat beberapa dimensi yang menurun salah satunya adalah international shipment-nya, kemudian logistic competent dan quality. Ini sangat-sangat penting menurut saya apalagi secara umum tentu sektor

transportasi lah yang menjadi sektor yang paling berpengaruh terhadap *logistic performance index* ini sehingga tentu kami ingin pada kesempatan ini agar ke depannya pembangunan konektivitas infrastruktur dalam sektor transportasi ini mengedepankan efisiensi biaya logistik. Kami juga heran gitu loh dengan *jour-joran* selama 8 tahun ini bangun tol gitu ya. Tetapi kemudian konektivitas terkait efisiensi biaya logistik ini *kok* nggak tercapai malah anjlok *gitu*, lalu *mis*-nya di mana *gitu*. Kami ingin pusat-pusat transportasi seperti darat laut dan udara ini bisa kemudian terkoneksi dengan semangat efisiensi biaya logistic sehingga ke depan kita bisa kemudian meningkatkan peringkat terkait *logistic performance index* ini. Ini maksud saya yang harus menjadi prioritas kawan-kawan di Kementerian Perhubungan. Masih ada waktu ya 2023-2024, saya pikir untuk memperbaiki peringkat ini.

Ketiga, realisasi PNBPN yang terus meningkat optimal sejak menurun di tahun 2019, 9,45 ya realisasi target PNPB ini kami sangat-sangat mengapresiasi kontribusi Kementerian Perhubungan terhadap apa namanya APBN tentunya. Tetapi di 2020-2021 menurun ya jadi Rp7,7 triliun ya 7,9 kemudian naik di 2022 dan targetnya 9,6 di 2023. Kami berharap di akhir tahun ini bisa kemudian sama atau bahkan kalau melihat selalu tinggi daripada target. Tetapi kami juga ingin memberikan saran dengan beberapa temuan pengawasan kami, Pak Menteri di lapangan. Sebenarnya kalau dioptimalkan lagi ya PNBPN dari terutama di sektor perhubungan laut. Ini saya yakin PNBPN Kementerian Perhubungan bisa tertinggi di seluruh kementerian bisa lebih dari Rp10 triliun per tahunnya. Kami menemukan, Pak, contohnya ya di Kaltim ada satu Tersus yang tidak mau wajib melaksanakan wajib pelayanan *gitu* yang mana di situ ada potensi PNBPN. Saya sebut saja misalnya pelayanannya disitu ada wajib pandu tunda, tetapi Tersus perusahaan tambang ini *enggak* mau gitu. Artinya ada *lost* PNBPN disitu, *nah* ini baru satu Tersus yang kita temui. Tetapi ini saya yakin dengan monopoli beberapa Tersus di tanah air ini, kalau kita optimalkan, benar-benar kita awasi kita monitoring, ini saya yakin bisa tembus di atas 10 triliun PNBPN Kementerian Perhubungan.

Kami sangat-sangat meminta agar Kementerian Perhubungan bisa meningkatkan lagi *monitoring* dan optimalisasi PNBPN-nya terutama disektor perhubungan laut ini. Jangan sampai kemudian ada ya SK gitu penyelenggaraan pelayanan wajib untuk optimalisasi PNBPN itu tapi Tersus-nya ini yang *ngatur* negara *gitu*, ini sudah *enggak* benar, ya itu juga merugikan swasta-swasta yang telah diberikan amanat oleh Kementerian Perhubungan untuk melayani wajib pandu tunda di Tersus tersebut.

Kemudian yang terakhir, kami sangat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya selama kami dipercayakan di Komisi V ini sejak 2019 sampai ini, pembangunan sektor transportasi di Kaltim cukup meningkat baik darat, laut, udara. Terminal-terminal kita di darat kita rehab menjadi lebih layak lagi, pelabuhan kita rehab, fasilitas darat maupun fasilitas lautnya, perlengkapan jalan, kita terus, keselamatan jalan kita juga terus kita tingkatkan, sektor perhubungan udaranya juga ada beberapa bandara kita Sepinggan, bandara APT Pranoto, bandara Kalimaro dan juga beberapa bandara perintis di Kaltim

juga terus mendapatkan fokus anggaran dari Kementerian Perhubungan, kami sangat mengapresiasi.

Tapi ada satu PR *nih* Pak Menteri, minggu kemarin kami baru didatangi dikunjungi oleh Bupati Mahakam Ulu melalui rapat di Komisi V. Kebetulan saya yang menerima juga diterima oleh Ketua Komisi V terkait Bandara Ujoh Bilang. Tahun lalu Bandara Ujoh Bilang, di Kabupaten Mahakam Ulu, tahun lalu Kementerian Perhubungan telah menerbitkan SK penetapan lokasi terkait bandara penghubung ini. Ini memang Mahakam Ulu ini adalah teras negeri perbatasan dengan Malaysia, terluar, tertinggal sehingga menurut saya memang sangat strategis kalau ada bandara di sini apalagi dalam kalau kita kaitkan dengan dukungan IKN. Ya, ini sangat jauh kalau dari pusat kota Samarinda, Ibu Kota Kaltim saat ini menuju Mahakam Ulu ini bisa sampai 16 jam ya sampai bisa bermalam kalau jalannya lagi apa namanya musim hujan dan lain-lainnya sehingga kami berharap walaupun kami memahami bahwa di 2024 tidak mungkin selesai pembangunan bandara ini. Tetapi kalau menunggu pembangunan 2024-2029, bandara ini tidak dimulai lalu apa gunanya Penlok diterbitkan tahun kemarin? Saya pikir ada tanggung jawab kita masih bisa menetapkan APBN 2024, menetapkan APBN 2025. Saya pikir ini cukup-cukup membantu signifikan apalagi dukungan dari Pemprov Kaltim untuk apa namanya fasilitas darat dan lahan sudah *clear*, mereka juga mau kontribusi penganggaran disit sehingga berharap dua tahun ini, Pak Menteri, Kementerian Perhubungan bisa kemudian mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Bandara Ujoh Bilang di Mahakam Ulu ini.

Mungkin itu, Pimpinan.

Terima kasih atas waktunya.

Saya izin menyerahkan dokumen yang tebal ini dari Pak Bupati Mahakam Ulu. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini gayung bersambut, Pak, ini Mahakam Ulu, saya usulkan dari 2 tahun lalu, Pak, pertama kali, Pak Novie masih Dirjen waktu itu. *Nah*, ini kalau yang punya Dapil sudah tindak lanjuti lebih jauh lagi, sudah benar, Pak.

Baik, Pak Irwan.

Selanjutnya Pak Syarif Abdullah, terakhir, Pak.

F-P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang salam Sejahtera.

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,
Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Pertama, saya menyampaikan ucapan selamat atas kesekian kalinya Kementerian Perhubungan mendapat WTP. Tentu ini merupakan satu hal yang perlu mendapat apresiasi berkaitan dengan pengelolaan program di sana sehingga mendapatkan nilai WTP, ini tentu suatu hal yang baik.

Yang kedua, Pak Menteri, saya mungkin kesekian kalinya untuk menyampaikan ini permohonan Masyarakat Kalbar dan juga dari Kuching. Kemarin itu Pak Konsul-nya langsung ketemu saya juga berkaitan dengan dibukanya kembali rute penerbangan Pontianak-Kuching, karena sampai saat ini rute tersebut belum berjalan, dan memang cukup banyak juga yang mengaspirasikan terhadap rute tersebut. Dan termasuk juga beberapa jalur seperti penerbangan internasional Kuala Lumpur-Pontianak sampai saat ini juga belum dibuka setelah covid dan ini juga merupakan suatu hal yang dimintakan dari masyarakat. Termasuk beberapa penerbangan lokal, sampai saat ini juga belum normal itu. Terutama daerah Sintang kemarin juga bupati-nya menyampaikan termasuk Kapuas Hulu itu masih 3 hari, 1 minggu 3 kali. Makanya kadang-kadang bisa dibatalkan *tuh*, saya juga pernah kena korban itu, naik mobil ya lumayan juga.

Yang kedua, berkaitan dengan program-program maupun kegiatan-kegiatan. Saya kira memang ke depan ini perlu secara ketat berkaitan dengan diawalnya FS, Pak. Karena saya lihat beberapa program yang telah kita lakukan ini tentunya kan itu berstandarkan FS dulu, sehingga baru kita tindaklanjuti, FS ini kan menggambarkan situasi secara keseluruhan.

Nah, ini tentu ini karena ini sudah memasuki tahun terakhir di 2024, beberapa yang perlu menjadi catatan kita ya. Saya kira di daerah saya itu ada satu pelabuhan di tengah laut, waktu itu diperuntukan untuk ya sebagai pelabuhan antara, sampai sekarang ini juga tidak digunakan itu di Padang Tikar Kemudian pelabuhan-pelabuhan beberapa di daerah-daerah lain termasuk juga bandara seperti Kertajati sampai sekarang itu cukup besar itu, kemudian *enggak* tahu Patimban yang tadinya kita rencanakan, tapi saya dengar-dengar katanya sangat lamban sekali, sudah bagus? syukur kalau sudah itu, tapi itu menjadi harapan kita.

Termasuk juga pelabuhan kami, Pak yang Bapak resmikan dengan Bapak Presiden, kalau bisa itu didorong saja, Pak, supaya cepat terpusat alur kita itu memang dangkal sehingga ini menjadi hambatan, di situ. Karena sampai saat ini juga kan belum dikeruk-keruk juga itu. Pelindo bilang sudah diserahkan ke kementerian, kementerian juga bilang ke Pelindo, Pelindo bilang kenapa *enggak* dikeruk? *enggak* mampu. *Nah*, ini saya kira ini tentu harus ada *power*-nya kan dari kementerian ini ya untuk mendorong itu ya bersama dengan BUMN lah ya, dengan kementerian ini, itu supaya itu dipusatkan saja sekarang supaya dimaksimalkan terhadap pelabuhan yang kita punya itu, Pelabuhan Kijing itu.

Nah, ini tentu menjadi harapan bagi kami untuk bagaimana karena menurut SPOS dan menurut beberapa kali saya ketemu dengan Pelindo, pelabuhan kita ini sangat strategis *loh*, Pak ya. Dan ini memang kalau dilihat dari letak strategisnya kan memang strategis itu, Pak, dalam arti dalam waktu sekian mile itu kan sudah menjadi pelayaran internasional. *Nah*, tentu itu merupakan hal yang strategis itu tentu harus diimbangi juga. Tapi kalau kita biarkan terus ini keenakan juga nih pelabuhan Pelindo malah tetap maunya tetap juga menggunakan pelabuhan yang ada sekarang itu. *Nah*, tapi ini juga akan berakibat terhadap pengembangan percepatan terhadap ekonomi di Kalbar.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan tentunya kami berharap program-program kedepan ini yang program masyarakat terutama bis itu, Pak Dirjen, sangat banyak yang berminat. Walaupun sekarang juga saya minta untuk dipercepat lah itu karena sampai sekarang belum juga terealisasi itu kegiatan itu katanya akhir tahun. Karena kami yang sudah kita plot itu nanyakan, kapan *nih*, Pak, kami dapat. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, Pak, yang masih belum direalisasikan itu lampu jalan.

Dan tentu apa yang disampaikan juga Pak Boyman tadi kaitan dengan halte, itu sangat mendukung, Pak, di dalam karena kita memang di daerah perairan, ya angkutan sungai memang masih jadi primadona di tempat kami itu. Tentu ini perlu untuk apa perlu menjadi perhatian yang sudah kita karena memang tahun kemarin saya lihat tidak terakomodir itu berkaitan dengan halte.

Kemudian terakhir menyambung tadi disampaikan memang status terhadap bandara yang sudah Penlok, tapi seperti Kayong itu ya Bapak perjelas saja kalau memang, ya karena memang saya juga memaklumi ini perlu juga selektif terhadap pembangunan, karena kita juga beberapa tempat ini ternyata, termasuk Singkawang juga sampai sekarang saya lihat belum juga beroperasional secara efektif, Pak. *Nah*, iya jadi saya lihat ya memang perlu untuk selektif lah terhadap hal ini. Ya, kita berharap tidak ada lagi hal-hal yang mangkrak di kemudian hari, tentu itu menjadi harapan bagi kita. Dan ini mungkin merupakan suatu evaluasi terhadap beberapa yang sudah ada sekarang ini, yang saya lihat ya kalau memang tidak ketat dari kementerian bisa menjadi hal yang mangkrak itu, Pak, beberapa yang kita lihat di dalam kegiatan itu.

Saya kira ini, Pak Menteri atas perhatian dan sekali lagi saya mohon yang berkaitan dengan program kerakyatan itu yang belum itu tolong direalisasikan Pak, soalnya sudah waktunya sudah bulan Juli ini.

Terima kasih.
Sekian.

*Wallahul muwaffiq Ila aqwamit thoriq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*
Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Syarif.

Selanjutnya, Pak Syahrul Aidi.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Ya.

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,**

Saya apresiasi tentunya terhadap kinerja Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan 2022 dan juga 2023 dan 2022 yang sudah mendapat penilaian dari BPK. Pak Menteri, kami sangat senang ketika pembahasan untuk program kegiatan 2023 kemarin keikutsertaan Komisi V dalam program-program Kementerian Perhubungan ini cukup dilibatkan.

Nah, hanya saja ada beberapa hal yang tadinya sudah tersampaikan ke konstituen tetapi belum ada pelaksanaan dan mudah-mudahan itu bisa direalisasikan di tahun ini. Di antaranya yang ini belum ada *progress*, Pak Menteri, dari kami di Riau itu halte sungai, ini halte sungai untuk dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Inhil. Kebetulan Kabupaten Kampar tempat saya tinggal itu memang tidak ada laut, yang ada hanya sungai dan daerahnya itu daerah miskin ekstrim. Jadi sekarang ini orang kalau mau membawa barang itu harus basah-basah dulu, Pak, harus basah-basah karena memang tidak ada haltenya. Ada 9 desa di sana yang memang satu-satunya transportasi adalah melalui sungai dan tidak ada haltenya, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa terealisasi.

Begitu juga di Kabupaten Inhil/Indragili Hilir ini memang daerah yang laut dan Sungai, Pak, disana, Pak, laut dan sungai. Dan masyarakatnya terbagi-bagi di pulau-pulau, dan ini sangat membutuhkan halte sungai untuk mereka karena kondisi keuangan di Inhil itu sangat minim untuk membangun transportasi, Pak, jalan saja tidak terbangun dengan baik apalagi yang berhubungan dengan halte sehingga mereka itu menggunakan ya untuk naik turun dari transportasi mereka itu menggunakan apa adanya Pak, mudah-mudahan ini bisa terbantu bisa terealisasi, ini sudah kita masukan waktu pembahasan di 2022 kemarin untuk kegiatan 2023. Mudah-mudahan bisa direalisasikan 2023.

Kemudian hasil komunikasi kami kemarin, *alhamdulillah* dapat tanggapan dari Pak Menteri, *Insyallah* nanti surat saya berikan terkait dengan

Bandara Tempuling Inhil, Pak. Jadi dari sekian banyak bandara yang dibangun di Riau oleh kepala daerah, ini yang *visible* sesungguhnya adalah bandara di Inhil karena jaraknya cukup jauh, Pak, naik kendaraan mobil darat itu 8 sampai 9 jam dari Sultan Syarif Kasim dari Pekanbaru, kalau yang lain-lain itu 3-4 jam. Jadi yang paling-paling mau diapakan mau dihidupkan, mau diaktifkan itu ya Bandara Tempuling Inhil, Pak. Dan kepala daerah sudah bersurat, saya nanti akan berikan dukungan juga surat agar ini bisa diaktifkan Bandara Tempuling, Pak.

Kemudian yang ketiga, Pak Menteri, ini sudah semenjak tahun 2020 saya meminta ini. Mudah-mudahan bisa dikabulkan, terkait dukungan terhadap trans metro Pekanbaru, Pak, trans metro Pekanbaru. Trans metro Pekanbaru ini adalah transportasi publik. Memang sekarang ini serba salah, kalau swasta membuat angkutan, mereka *enggak* untung, Pak, karena masyarakat banyak yang punya sepeda motor.

Jadi sekarang kalau angkutan kota misalnya, dulu banyak angkutan kota di Pekanbaru itu, tetapi tidak aktif lagi secara ekonomi *ndak* menguntungkan sehingga yang tidak punya kendaraan bermotor atau sepeda motor mereka mengandalkan trans metro ini. *Nah*, sehingga disubsidi lah oleh kota Pekanbaru itu 19 miliar per tahun, Pak.

Nah, kami meminta kebetulan ada perluasan pengembangan kota Pekanbaru yang dikenal di Riau itu namanya Pekan Sekawan, Sekawan itu Siak, Kampar dan Pelalawan, kebetulan daerah penyangga kota Pekanbaru. Berharap trans metro itu sampai ke kabupaten-kabupaten ini. *Nah*, mohon dukungan karena ada program kita BTS yang dananya cukup besar, ya disisihkan lah 10-20 miliar ke Kota Pekanbaru. Karena Kota Pekanbaru itu sekarang sudah menjadi kota tempat hijrahnya dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, itu perkembangannya cukup pesat, Pak, keluasan wilayahnya, penambahan penduduknya cukup besar. *Nah*, ini mohon dukungan transportasi kita sehingga saya contohkan ada daerah kita yang sedang dibangun tol, Pak, titik nol tol kita itu, itu ke arah Pekanbaru tidak ada transportasinya. *Nah*, mudah-mudahan dengan adanya diperluasnya jangkauan dari trans metro Pekanbaru ini nanti bisa membantu masyarakat untuk transportasi hilir mudik ke Pekanbaru.

Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari seluruh Anggota telah selesai, selanjutnya ke meja Pimpinan. Untuk kesempatan pertama saya serahkan ke Pak Iqbal, silakan Pak.

F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Ketua.

**Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajaran dari Kementerian Perhubungan,
Yang saya banggakan teman-teman Komisi V,**

Ada beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan, yang pertama berkaitan dengan anggaran. Anggaran untuk tahun 2023 sebesar 34,7 triliun, disini dari data yang Pak Menteri sampaikan kepada kami sudah terealisasi sebesar 31%, saya sangat mengapresiasi tentang hal ini. Dan dari realisasi unit kerja Eselon I, yang paling tinggi di sini adalah Irjen ya Pak ya 45,78%. Saya berharap unit kerja Eselon I yang lain bisa menyesuaikan secepatnya.

Kemudian realisasi per jenis belanja juga disini ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, saya kira cukup bagus realisasinya terutama belanja pegawai. Dan berkaitan dengan anggaran, belanja barang dan belanja modal ini saya melihat pagunnya kan sama *nih* Pak 18,2 triliun, kemudian belanja modal, *eh* 15,2 belanja barang, belanja modal 15,7. Saya berharap untuk tahun 2024, tahun depan kalau bisa diperbanyak belanja modal, Pak Menteri, karena memang belanja modal ini kan untuk jangka panjang untuk aset Kementerian Perhubungan itu sendiri, walaupun belanja barang itu penting juga.

Kemudian juga tentang target-target realisasi per unit kerja Eselon I tahun 2023, di halaman 6. Saya ingin bertanya *nih* kepada Dirjen Perhubungan Laut. Ini targetnya sangat tinggi sekali *nih* Pak, kalau kita lihat yang biru ini kan target ya, kemudian realisasinya yang kuning. Kira-kira target sebanyak ini setinggi ini kira-kira apa saja untuk target penerimaan negara bukan pajaknya PNBPN-nya, tolong dijelaskan kepada kami.

Kemudian yang terakhir tentang pagu indikatif 2024 ini kan kalau dari surat Kementerian Keuangan sebesar 38 triliun, namanya indikatif itu kan bisa bertambah bisa berkurang, Pak, tergantung nanti keputusan dari Kementerian Keuangan nanti, dan tentu kita akan dapat rapat lebih detail lagi. Saya tidak bertanya detail tentang hal ini.

Kemudian ini berkaitan dengan Dapil, Pak Menteri. Tadi teman-teman juga banyak memberikan informasi tentang Dapil. Saya secara umum saja, Pak Menteri, saya dari Sumatera Barat, Dapil Sumatera Barat. Saya berharap agar ada program-program dari Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan Tupoksi Bapak baik sarana dan prasarana agar bisa ditingkatkan lagi di Provinsi Sumatera Barat.

Saya kira itu saja, Pak Menteri yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Ilham.

Selanjutnya Pak, iya, silakan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Roberth, minta saya duluan.

KETUA RAPAT:

Iya iya.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Biasanya dia minta duluan Pak Menteri karena dia selalu pulang duluan.

**Terima kasih Pak Iwan, Pak Roberth, Pak Iqbal dan teman-teman Anggota Komisi V yang lainnya,
Yang saya hormati Pak Menteri dengan para Dirjen dan seluruh jajarannya,**

Soal pemeriksaan BPK, saya pikir kita sudah memberi apresiasi yang luar biasa kepada Pak Menteri.

Saya cuma dua hal Pak Menteri, yang pertama, Indonesia ini kan banyak kepulauan, Pak Menteri, banyak sekali kepulauan kita dan pulau-pulau kecil. Di sisi lain, fasilitasnya hampir sama sekali tidak ada apa-apa baik itu darat, laut, udara. *Nah*, kebayang Pak Menteri kalau tiba-tiba mereka sakit Pak, di musim-musim tertentu misalnya jauh dari kota jauh dari rumah sakit. Mungkin barangkali ini perlu ada pemikiran dari Pak Menteri, ya dibantu dengan Pak Dirjennya, bagaimana Bu Dirjen bagaimana cara untuk mengatasi persoalan ini.

Salah satu pemikiran barangkali yang bisa kita lihat di televisi itu kan sudah ada amfibi-amfibi yang kecil-kecil itu, Pak Menteri. Ya, yang kecil-kecil itu pesawat amfibi yang bisa mendarat di laut yang pada akhirnya kalau ada orang sakit misalnya orang melahirkan misalnya atau apa yang mengancam nyawa manusia yang ada di situ barangkali bisa segera diantisipasi.

Nah, tentu mungkin sumber dananya juga agak susah barangkali kalau hanya Kementerian Perhubungan, karena menyangkut kesehatan misalnya, apa menyangkut daerah dan seterusnya. *Nah*, oleh karena itu mungkin bisa bekerjasama dengan Angkasa Pura, kemudian bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, bisa kerjasama dengan daerah-daerah provinsi misalnya provinsi ya dalam bentuk CSR itu barangkali bisa dipakai. Itu penting,

Pak Menteri, karena menyelamatkan nyawa orang ini bukan suatu yang biasa Pak. *Nah*, kalau ini Pak Menteri bisa pikirkan barangkali juga jalan keluar untuk mengatasi kondisi transportasi kita di Indonesia, amfibi cukup yang kecil yang bisa mendarat di laut, dari berbagai apa namanya keadaan cuaca yang ada.

Yang kedua, di saya terima kasih Wakatobi ini sebenarnya sudah hampir penuh ini, Pak Menteri, siapkan di Wakatobi ini bahkan karena Wakatobi ini adalah 10 daerah tujuan wisata nasional kita. Cuma kalau saya lihat di sini ada subsidi angkutan antar moda KSPN Wakatobi ini tercatat disini pada halaman 22. Cuma sedikit aneh *nih*, Pak, bahwa Wakatobi itu pernah kehilangan hubungan udara sama sekali ada, pernah kehilangan, sekarang sudah ada tapi dua kali seminggu, dua kali seminggu. Anehnya itu adalah daerah tujuan wisata nasional kita tetapi pesawatnya tidak tiap hari, Pak. Padahal yang pakai di sana bukan cuma turis yang pakai, tetapi bisa dipakai juga oleh masyarakat lokal. Ini barangkali juga mudah-mudahan sudah masuk dalam subsidi disini sehingga bisa tiap hari masuk, mungkin bisa disubsidi selama enam bulan misalnya, bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu juga bisa dibicarakan. Karena ada dua kabupaten yang sangat signifikan untuk komunikasinya di sana, Pak, bahkan dengan Makassar dengan Makassar seharusnya, Makassar, kemudian Bau-Bau, kemudian Kendari, kemudian Wakatobi, ini bisa ini, *nah* berarti pemerintah provinsi bisa terlibat.

Di Bau-Bau itu bisa terlibat ada beberapa kabupaten, Pak Menteri, Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, kemudian Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, ini semua bisa kerjasama sebenarnya. Kalau diramai-ramakan itu saya yakin kecil ini pengaruhnya, di 6 bulan setahun kemudian saya yakin itu akan maskapai penerbangan itu mengecil tidak ada kerugian lagi, kalau di-*supply* sampai 6 bulan, 6 bulan itu juga kan ada kondisi tertentu. Misalnya, Pak Menteri, kalau *full* penumpang ya berarti tidak perlu disubsidi, tapi kalau kurang penumpang misalnya seperti sekian *gitu* misalnya diberikan bantuan seperti itu.

Nah, ini kalau itu bisa terjadi, Pak Menteri, berarti Wakatobi itu salah satu daerah tujuan wisata bisa teratasi semua persoalannya. Apalagi seperti sekarang Pak Menteri, musim ombak, setengah mati orang ke sana, Pak.

Jadi itu saja, Pak Menteri.

Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Iwan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ridwan.

Selanjutnya, kami persilakan ke Pak Robert Rouw. Silakan, Pak.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Saudara Menteri Perhubungan dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Saya sesuai jadwal dan tema acara kita pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI dan Saudara Menteri Perhubungan, saya kira yang pertama evaluasi pelaksanaan APBN 2023. Kami sangat memberikan apresiasi karena hasil pemeriksaan BPK, saya kira di semester I/2022 ini sangat baik. Maka kami yakin 2023 pasti Pak Menteri dan jajaran lebih meningkatkan lagi kinerja dan seluruh tatanan yang sudah digariskan oleh pemeriksa keuangan kita untuk bisa tidak ada lagi hal-hal yang mendapat perhatian atau temuan di dalam semua kegiatan program yang kita putuskan bersama di sini, Saudara Menteri.

Yang berikutnya, saya masuk ke pembicaraan pendahuluan kita terhadap rencana kerja Tahun Anggaran 2024. Pembicaraan pendahuluan, saya kira ini yang menjadi fokus saya kira harus kita sepakat di sini dan ini harus masuk didalam keputusan kita. Bahwa kita bicara pendahuluan maka kita semua bicara sesuai amanat yang kita pegang, Pak Menteri. Ada undang-undang yang menjadi beban kita untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi kita dari daerah. Maka itu harus bisa setiap kali membahas tentang rencana kerja pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah dalam hal ini Presiden punya diskresi khusus, Anggota DPR punya aspirasi yang dibawa dari daerah, itu harus masuk didalam rencana kerja ini.

Jadi, kita tidak bicara selalu disini ya rutinitas kita, cuma bicara gambaran besar tetapi isinya kami tidak ada di dalam. Maka, saya minta supaya untuk 2024 ini teman-teman, kita harus lebih fokus agar pembicaraan awal inilah kita harus menyusun bagaimana kita bisa ada di sana sesuai amanat undang-undang yang membebaskan kita untuk bertanggungjawab terhadap daerah kita masing-masing. Jadi, saya kira Pimpinan ini perlu sekali yang dibicarakan tentang pendahuluan ini bagaimana pengaturan supaya pembahasan itu, aspirasi-aspirasi dari daerah teman-teman ya kan, dari daerah, bukan cuma di daerah pemilihan kami saja. Tapi ada daerah-daerah yang selama ini aspirasinya tidak bisa tersampaikan, maka itu selalu harus ada salurannya. Saya kebetulan salah satu Pimpinan Fraksi, makanya saya dapat banyak masukan dari daerah untuk bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi ini ke pemerintah pusat. Jadi saya kira ini yang perlu saya tekankan di rapat kita tentang pendahuluan rancangan anggaran Tahun Anggaran 2024.

Yang berikut, saya ini banyak aspirasi Saudara Menteri dari daerah-daerah kami. Yang pertama, tentang subsidi di daerah kami, Pak Menteri, untuk angkutan udara, karena kami di daerah pegunungan itu sangat sangat membutuhkan transportasi udara. Kalau tidak ya masyarakat akan jalan sehari-hari karena belum ada transportasi darat, fasilitas transportasi darat yang bisa masyarakat lewati itu. Maka ini menjadi perhatian kami dan kami sangat prihatin melihat masih ada daerah-daerah kami yang memang belum dapat dilayani. Maka, saya kira dengan dibukanya tadi saya sampaikan itu, itu bisa kami masuk ke sana agar aspirasi-aspirasi yang dari daerah itu bisa kami perjuangkan di sana karena biar ada perimbangan, kami lihat ada perimbangan

keadilan di dalam memberikan program-program untuk masyarakat khususnya di daerah tertinggal-tertinggal ini.

Dan sekali lagi Pak Menteri dan seluruh jajaran, kemarin saya banyak berdiskusi sama teman-teman dari pegunungan. Ada beberapa daerah yang memang belum mendapat subsidi seperti Mamberamo Tengah, itu belum mendapat subsidi sama sekali. Karena pada waktu itu bupatinya tidak tahu masalah apa, beliau membuat surat menolak subsidi, padahal rakyat sangat membutuhkan itu. Ya, itu saya kira masalah politis, cuma karena masalah landasan yang di cat warna partainya, *nah* itu tidak ini maka beliau tolak itu. Itu saya kira pemimpin kurang bijak, tapi rakyat sangat membutuhkan itu. Maka saya minta mungkin bisa dapat segera diberikan, Pak Menteri, karena ada beberapa daerah disana yang saat ini menjadi kendala untuk angkutan udara karena ya kita tahu daerah merah, itu sangat bermasalah. Harapan saya daerah-daerah yang bermasalah itu jangan sampai anggarannya hilang, lebih bagus bisa dialihkan untuk daerah yang belum dapat menerima subsidi.

Jadi, saya kira sangat disayangkan kalau anggaran itu diperuntukan untuk subsidi apalagi di daerah kami, tidak keluar dari Papua, tapi dia ada di sana untuk bisa dialihkan segera untuk daerah-daerah yang belum menerima subsidi, karena itu sangat membutuhkan. Begitupun di daerah Yahukimo juga karena itu daerah sangat luas, masih banyak juga membutuhkan bantuan, begitu.

Yang berikut, saya kira ada beberapa daerah yang menyampaikan untuk saya kira tadi saya baca banyak, saya setuju visi, misi pemerintah untuk bisa mengurangi apa ketertinggalan daerah-daerah yang tidak bisa mendapat fasilitas-fasilitas penerbangan. Dan ini perlu juga ada pembangunan bandara-bandara yang belum layak pemerintah daerah tidak sanggup untuk melakukan itu. Jadi, mungkin ini minta perhatian, Pak Menteri, pada di daerah kami di pegunungan itu masih banyak yang diperlukan.

Yang berikut, Pak Menteri, soal bandara ini, saya sekarang ini lagi didatangi oleh teman-teman dari Papua Barat, Kabupaten Teluk Gondama. Karena mereka sudah sampaikan bahwa Bapak Presiden waktu hadir kesana Bapak Presiden janjikan bahwa nanti akan diberikan bandara, tapi sampai saat ini mereka belum diberikan. Jadi, mohon maaf, Pak Menteri, nanti mungkin setelah selesai, Pak Menteri, saya bisa, saya sudah sampaikan mereka nanti mereka serahkan proposalnya ke Pak Menteri langsung, ya supaya bisa Pak Menteri menjadi perhatian karena ini Bapak Presiden sudah harapan kami apa yang dijanjikan Presiden jangan sampai Presiden turun itu menjadi beban beliau belum menyelesaikan. Jadi, ini yang saya ingin sampaikan.

Yang berikut, saya kira, Pak Menteri, saya harus memberikan apresiasi Pak Menteri. Bahwa kita ini selalu bermitra dan apa yang ingin saya sampaikan bahwa kerjasama kita ini perlu kita tingkatkan terus. Saya kemarin dua hari kemarin, hari minggu itu saya ada duka saya ke Jogja, Pak Menteri. Saya pulang itu bandaranya penuh dan hampir tiket semua habis, tapi saya bersyukur Ibu Dirjen itu tanggap sangat membantu kami sampai saya bisa

dapat tiket pulang. Tapi bukan sampai di situ, Pak Menteri, masalah ada di sana. Saya, Ibu Menteri, saya dapat tiket itu yang jam 8.20, Ibu Menteri dapat lagi tiket dimaj uin jam 5 tapi saya *enggak* bisa karena masih ada proses pemakaman di Klaten, akhirnya saya bilang saya ambil jam 8. Sampai di sana pas kami mau *take off*, Pak Menteri, pesawat sudah keluar mau lepas landas kembali, diminta kembali. Saya bersyukur karena masih teknisi itu liat bahwa ada bocoran oli netes di sana. Pesawat penuh tidak ada tempat yang kosong, ada tetesan bocor, kami kembali dan saya minta kepada Direktur Maskapai, saya bilang jangan dipaksakan, kalau tidak ganti pesawat saya tidak mau, iya Pak kami siap ganti pesawat, tapi bandara tutup.

Ini masalah ya kan, penumpang sudah mulai resah, terus terang kalau saya ikut provokasi penumpang pasti ramai banget itu pasti ramai, ada orang bule lagi disitu, resah. Tapi saya tenangi mereka sampaikan bahwa ini demi keselamatan kami semua, apakah anda mau kami jatuh sama-sama? Ini tidak ini. Jadi saya harapkan hal-hal ini yang perlu juga maskapai terbuka, karena mereka takut, saya bilang tidak, harus sampaikan, biar saya sampaikan kepada penumpang. Teknis itu apa *gitu* yang memang ini tidak mungkin diterbangkan, resikonya besar, tapi jangan cuma *oh* ini ada masalah teknis, apa masalahnya, ya kan? Ini yang perlu harus mungkin Pak Menteri bisa sampaikan.

Jadi para operator itu harus menyampaikan rakyat betul-betul tahu begitu dan hak-haknya harus diberikan ya kan. Jadi saya kira, saya sangat berterimakasih kemarin, dan dari jam 8 kami sampai terbangnya jam 12.30 ya hampir jam 1 lah kami terbang tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 2 lebih ya kan. Jadi saya kira tapi, operator penerbangan, sesuai dengan amanat undang-undang, mereka berikan apresiasi dengan *cash* kepada penumpang. Saya kira itu baik cuma yang ingin saya sampaikan bahwa harus terbuka agar masyarakat itu tahu. Kami sampaikan kepada mereka, baru mereka mengerti ya sudah, tapi anda mau kita nginap apa anda mau kita terbang? Pak, kalau bisa kita terbang, oke saya telfon Ibu Dirjen supaya bandara dibuka. Kalau penumpang semua bilang kita nginap ya nginap, tapi mereka setuju, Pak, kalau bisa kita terbang *gitu*. Jadi cuma 6 orang saja yang batal karena bayinya ini, jadi sekeluarga itu minta turun.

Saya kira hal-hal ini yang mungkin menjadi perhatian kita dan kalau kita tidak mengalami kita tidak ikut di situ ya ini jadi tanda tanya besar untuk masyarakat. Tapi kami ikut untuk supaya bisa menenangkan rakyat dan memberikan pemahaman pada rakyat soal hal seperti ini.

Yang berikut, saya kira kerja sama kita sudah bagus selama ini, staf kami berhubungan dengan jajaran Pak Menteri sudah bagus Pak Robi. Tapi hampir beberapa bulan ini terus terang, staf saya ngeluh, Pak Menteri, ini operator tempat Bapak ini hilang ke mana *gitu*, Pak Taufik ini. Program ditanyain hilang semuanya, tanya ke daerah, itu Pak Taufik. Ini, ini tolong supaya kerja sama yang sudah ada ini bisa jalan terus, Pak. Staf mau tanya program yang di daerah kami yang selama ini, ya? Pak Taufik ini kan bawahannya Pak Robi dulu kan yang bisa di Roren itu ya perencanaan *gitu*. Ya, artinya itu hal-hal ini yang perlu mungkin menurut saya kita bangun sudah

baik, jangan sampai tiba-tiba karena apakah sudah mau habis kita? Jadi kita tidak lagi dianggap untuk bisa bekerja sama.

Jadi saya kira itu, Pimpinan, yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf Pak Menteri tapi hal-hal ini yang perlu menurut saya kita perbaiki lagi kinerja kita. Harapan saya, para Dirjen bisa kita ya bekerja sama, kita telepon, kita ini karena masalah-masalah seperti ini ya kan. Ya, harapan saya, Pak Toha juga jangan goyang-goyang kepala, kita harus kerjasama yang baik, Pak Toha ya.

Jadi, ada beberapa hal yang memang harus kita saling ya jadi tidak perlu pada Pak Menteri, para Dirjen ini lah yang perlu menyelesaikan. Saya kira jadi kita tidak perlu lagi membebani, Pak Menteri, ini yang paling. Kalau semua kami berteriak apalagi kami, Pimpinan di sini, bagaimana kami saja seperti itu, Anggotanya bagaimana. Harapan saya tidak hanya cuma kepada Pimpinan, tapi semua Anggota juga dilayani seperti itu karena itulah yang ingin kami sampaikan.

Pimpinan, saya kembalikan, terima kasih atas semuanya. Pak Menteri nanti saya akan berikan ini, masyarakat, para pimpinan daerah juga tahu kami menjadi saluran mereka ya terpaksa kami siap saja. Ini cukup banyak yang akan nanti saya sampaikan Pak Menteri dan berikutnya nanti para bupati dari dan stafnya dan jajaran dari Wondama, saya minta mereka sudah menunggu kami di situ kalau sudah selesai.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kembalikan, mohon maaf kalau panjang.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Robert.

Ya, saya sedikit, Pak Menteri.

Jadi menyampaikan yang tadi memastikan bahwa Kunker spesifik kami tanggal 15 Juni nanti ke Bandara Hasanuddin dan juga ke Basarnas itu sekaligus ingin mempertegas penyelesaian Bandara Hasanuddin yang sekiranya menurut jadwal harus selesai pada saat Desember 2021. Dan pada tahun lalu juga sudah dijanjikan oleh Dirut AP, Pak Faik akan segera dilaksanakan dan *alhamdulillah* sekarang belum selesai dan belum ada gerakan-gerakan yang kira-kira optimal untuk bagaimana supaya bandara tersebut bisa rampung sebagaimana kita harapkan.

Ini salah satu bandara yang tentunya mendapatkan keuntungan, Pak Menteri, kami juga jangan dianaktirikan dari 10 bandara yang kemarin dibangun oleh AP, bandara Makassar lah yang tertunda gitu Bandara Hasanuddin. Kami harap bahwa ada dukungan dari Pak Menteri untuk bisa menguatkan hal tersebut. Selain daripada itu, kami mendapat informasi di Bandara Hasanuddin ini masih banyak lahan-lahan yang belum terbebaskan. Bahkan ada satu lahan

yang berada dalam parameter pagar bandara tersebut, Pak Menteri. Jadi ada pagar pertama dan pagar kedua, bahkan jarak tanah tersebut tanah masyarakat tersebut sekitar 150 atau 170 meter dari *runway*. *Nah*, ini di dalam lahan tersebut masih ada ternak dan lain sebagainya dan saya kira ini harus segera diselesaikan. Mengingat bahwa dari pihak AP dikonfirmasi menunjuk ke pihak Otban, dari Otban juga saya *enggak* tahu menunjuk ke pihak Pemprov. *Nah*, ini kasihan masyarakat kita juga yang tidak mendapatkan kejelasan terhadap kepemilikan lahan dia, lahan mereka sehingga mungkin pada saat Kunker nanti juga kami akan membahas hal tersebut.

Selanjutnya, menyangkut masalah destinasi pariwisata prioritas. Kami juga berharap dari Sulawesi Selatan bisa dimasukkan Pak Menteri karena tahun lalu juga kami sudah sempat mengusulkan untuk bandara pariwisata atau bandara wisata di Kabupaten Bulukumba Tanjung Bira itu juga mendapat *support* dari Menteri Pariwisata pada saat kunjungan itu Pak Sandiaga Uno. Dan mudah-mudahan saya tadinya berharap waktu melihat destinasi pariwisata prioritas ini sudah masuk, ternyata Bulukumba masih belum. Dan kemudian untuk hal itu desainnya pun sudah diselesaikan atas kerja sama antar pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Jadi mudah-mudahan bisa terakomodir dan mungkin bisa di-asistensi apa yang menjadi desain daripada Pemprov tersebut.

Dan tentunya, untuk pengoprasionalannya saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri. Penerbangan di Kabupaten Bone sekarang ini sudah mulai lancar dan kemudian dari pihak Pemprov memberikan subsidi kepada masyarakat sehingga memang ini yang dibutuhkan peran aktif daerah, bukan hanya pemerintah pusat saja, Pemprov maupun pemerintah kabupaten harusnya bisa memberikan *support* di situ sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa layanan penerbangan itu bisa lebih efektif dan lebih efisien.

Selanjutnya, Pak, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan Bae di tempat kami juga. Pada rapat-rapat sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwa terdiri dari kabupaten kepulauan yang mana di mana pulau-pulau tersebut berbatasan dengan bahkan lebih dekat dari Kalimantan Selatan atau lebih dekat dengan NTB, ini wilayah-wilayah yang sulit untuk kami memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat kami di sana. Pada tahun lalu juga kami meminta kepada Kementerian Perhubungan agar menganggarkan bandara perintis mungkin, Pak. Ya, sifatnya untuk mengakomodir atau mengantisipasi kondisi-kondisi darurat apabila ada masyarakat kita yang mengalami sakit dan lain sebagainya.

Selanjutnya saya menambahkan sedikit lagi men-*stressing* apa yang disampaikan oleh Pak Irwan Fecho tadi tentang optimalisasi PNBPN di wilayah-wilayah perhubungan laut mungkin dari Tersus-Tersus tadi. Kita melihat banyak sekali Tersus yang kemudian sepertinya menjadi otonomi, menjadi punya kemampuan luar biasa tidak dapat diatur oleh negara sehingga tidak menggunakan fasilitas-fasilitas atau peraturan-peraturan menteri yang telah dikeluarkan oleh Bapak sendiri, yang kalau *enggak* salah itu termasuk di

antaranya adalah Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015. Ini banyak sekali Tersus yang kita ada potensi *lost* PNBP disitu dan saya kira yang namanya *lost* PNBP adalah kerugian buat negara kita juga, Pak. *Nah*, ini saya harapkan bahwa ada sikap tegas dari Pak Menteri Perhubungan ataupun melalui Pak Dirjen Perhubungan Laut agar supaya hal-hal tersebut dapat ditertibkan apalagi wilayah-wilayah itu sudah diatur oleh Menteri Perhubungan untuk dilaksanakan sebagaimana peraturan menteri yang sudah dikeluarkan.

Selain daripada PNBP tersebut, monopoli juga terjadi sangat luar biasa di wilayah-wilayah itu. Mulai dari hulu ke hilir semua dikuasai sehingga kemudian hal ini kita tidak membuka ruang bagi pengusaha-pengusaha lain atau masyarakat lain untuk dapat berpartisipasi di wilayah itu. Jadi tolong maksud saya, di negara kita ini ada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang juga bisa dipergunakan untuk bagaimana supaya monopoli yang terjadi di wilayah-wilayah Kementerian Perhubungan oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau perusahaan-perusahaan swasta tertentu itu dapat diminimalisir, Pak.

Kita berharap bahwa regulasi yang Pak Menteri buat bisa membuat peluang yang banyak bagi pengusaha-pengusaha yang lain tapi tidak dikuasai oleh satu pengusaha-pengusaha tertentu, apalagi wilayah itu bukan wilayah yang dia tentukan. Semisal Pak, Tersus kemudian melelang atau menenderkan untuk BUP-BUP tertentu yang ditunjuk. Dia dalam kapasitasnya tidak dalam, kalau saya baca peraturan menteri yang Bapak miliki Peraturan Menteri Nomor 57 ini, Tersus tidak memiliki kewenangan untuk itu. Tetapi yang terjadi di lapangan mereka melakukan itu dan kemudian perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pelimpahan dari Dirjen Perhubungan Laut misalkan, itu menjadi tidak ada gunanya, Pak, kalau tidak ditunjuk oleh Tersus. Jadi Tersus inilah yang membuat aturan-aturan yang mana aturan tersebut tidak sesuai dengan peraturan menteri yang Bapak buat. Mungkin itu yang kami harapkan nanti dapat lebih dipertegas bagaimana agar supaya semua orang, semua pihak bisa mendapatkan perlakuan yang sama dan perlakuan yang adil di setiap wilayah.

Mungkin itu dari kami, Pak Menteri. Semua dari Komisi V dan Anggota telah selesai menyampaikan pendalaman dan pertanyaan.

Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih.

Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Kasih ini Bapak Menteri orang ini belum makan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini supaya bisa cepat makan, Pak, tinggal tanggapan selesai makan semuanya, iya.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Secara umum yang hampir semua menanyakan mengenai udara, memang udara ini belum pulih ya jadi jumlah pesawat itu dari 650 sekarang baru 400. Dan juga kita lagi mengupayakan bagaimana jumlah itu dinaikkan dan maskapai itu ditambah, sehingga terjadi kompetisi. Tapi apapun itu menjadi catatan bagi kami untuk melakukan peningkatan.

Lalu berkaitan dengan prasarana yang belum terbangun, kita akan koordinasikan nanti dalam rapat kerja dengan Dirjen. Silakan dilakukan pendalaman dan saya minta kepada Pak Sekjen dan Pak Dirjen dan juga para kepala badan untuk memperhatikan catatan-catatan yang disampaikan tadi agar ditindaklanjuti.

Lalu berkaitan dengan Tersus, saya memang *extra effort*, Pak Pimpinan, untuk melakukan, memang di (*suara kurang jelas*) begitu dan kita akan melakukan *law enforcement* berkaitan itu agar bisa dilaksanakan dengan baik. Program padat karya juga PJU dan BES kita akan segera jalankan supaya tidak sampai bulan Desember itu sudah dijalankan semua.

Berkaitan dengan, Pak, Jadi saya mau jawab Pak, kereta api kemarin ke Purworejo Pak, jadi Bapak *nggak* hadir. Itu membuat reaktivasi, bahkan tempat-tempat lain mungkin yang di Jawa Timur banyak yang ngiri. Tapi itu menjadi kita lakukan secara bertahap dan Purworejo sebenarnya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal.

Hal lain yang perlu kami sampaikan, tadi banyak berkaitan dengan ODOL. Ini juga kita sedang bicara berkaitan dengan itu dengan Apindo. Di mana Apindo itu ingin tetap melakukan ODOL itu seperti itu, sehingga kita harus lakukan dengan maksimal.

Lalu berkaitan dengan PNBPN, seperti diketahui bahwa PNBPN itu adalah satu ruang bagi kami untuk meningkatkan jumlah dari belanja itu sehingga memang kami pikir untuk lakukan dan *Insya Allah* laut akan melakukan itu dengan rumusan-rumusan dari Bapak-Bapak tentang Tersus kita akan lakukan dengan seksama.

Pak Pimpinan dan Para Anggota,

Hal-hal itu yang menjadi prioritas kami, kami akan klasifikasikan pertanyaan-pertanyaan ini dalam satu jawaban yang sistematis sehingga *Insya Allah* bisa memberikan jawaban kepada Bapak-Ibu sekalian. Dan *Insya Allah* kami selalu menjadi mitra dan karena juga Bapak dan Ibu banyak sekali masukannya kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan dengan baik.

Kami masih kurang dari maksimal, tapi yakini bahwa kami akan berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

F-P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya interupsi, Ketua.

F-P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Sedikit, Pimpinan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Bapak Menteri yang saya hormati,

Saya melihat dari direktorat jenderal itu pemahaman PKT itu bergeser. Padat karya tunai itu sebetulnya diambil dari pengalaman Amerika ketika malaise. Terus kemudian ditambahi kata "T" oleh Bapak Presiden Padat Karya Tunai, pada saat covid itu baru ramai-ramainya. Lalu ruas-ruas yang diambil itu harus ditentukan oleh Satker atau PPK. Kemudian misalnya di stasiun, ya tidak mungkin lalu pekerjaan padat karya tunai di stasiun, satu itu bukan miliknya kereta api. Tapi mengambil ruas, ruas rel kereta api, terus jatuhnya di desa mana, desa itulah yang mengirimkan kepada Satker atau itu, kontraknya berapa bulan, satu bulan, setengah bulan tetapi dibayar tunai *gitu*. Bahwa lalu sekarang kesulitan tidak dibayar tunai tidak apa-apa, tapi tenaganya itu tenaga setempat.

Yang tidak ketemu nalar itu kalau pelabuhan lalu PKT tapi tenaganya dari mana? Itu karena politis supaya Komisi V juga kebagian menggerakkan sebagian anggotanya ikut rakyatnya pemilihnya ikut merasakan PKT. Jadi saya mohon mungkin ada perbaikan, jadi PKT ya jangan stasiun, lalu pelabuhan juga Pelabuhan, pelabuhan kan bukan punya kita yang mengelola. Jadi sepanjang ruas yang dilewati itu dipilih saja ruas ini lalu tempatnya di desa ini, tinggal ngontak Anggota Komisi V desa ini saya ini, Bu, saya butuh tenaga sekian *nih* seperti Bina Marga, Pak. Jadi Bina Marga itu jelas ruasnya diberi tahu, pekerjaannya ini, butuhnya tenaga ini selama sekian bulan lalu Kades disuruh mengirimi. Saya kira ini sangat penting apalagi tidak ada satupun dari teman-teman kita tidak membutuhkan suara dari Dapilnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, singkat Pak.

F-P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Terima kasih, saya singkat saja.

Cuma ingin mempertegas saja kepada Pak Menteri berkaitan dengan pembukaan rute Pontianak-Kuching, Pak, itu saya mohon sekali lagi karena memang permohonan dan daerah negara Serawak pun sudah memberikan itu, cuma katanya masih otoritas di wilayah kita. Jadi dalam hal ini ya otoritas, Pak Menteri. Saya mohon itu, Pak.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Syarif.

Saya bacakan kesimpulan langsung ya.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN
MENTERI PERHUBUNGAN
SELASA, 6 JUNI 2023**

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, di mana capaian perbulan Mei 2023 sebagai berikut: realisasi keuangan 31,26% dan realisasi fisik 35,02%.
3. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 Kementerian Perhubungan sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 hal: Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:
 - Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.537.733.543.000,00;
 - pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.077.079.886.000,00;
 - Selisih atau *backlog* sebesar Rp36.460.653.657.000,00.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 di DPR RI.

4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan program dan kegiatan berskala nasional dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai saran masukan Komisi V DPR RI sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Bagaimana Pak Menteri, setuju dengan itu? Anggota? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Belum Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ini yang keempat di sini.

KETUA RAPAT:

Yang keempat?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya, saya kira ini apa yang tadi saya sampaikan.

Komisi V sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan program dan kegiatan berskala nasional dalam ini sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Ini kegiatan ini Ketua, menyesuaikan program dan kegiatan berskala nasional. Berarti kalau kami yang di daerah, kami tidak skala nasional tidak masuk nantinya, Dapil kami kan. Jadi harus...

KETUA RAPAT:

Ya sudah.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pakai skala nasional.

KETUA RAPAT:

Hilangkan *anu*-nya berskala nasionalnya. Kegiatan saja langsung, program dan kegiatan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Jadi itu dibuang, jadi kami diikat ditutup di situ, pintu kami selalu ditutup-ditutup begitu, tidak boleh. Jadi kalau tidak berskala nasional ya ini tidak boleh masuk.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Dikeluarkan saja, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, iya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Yang nasionalnya dikeluarkan. Program kerja Kementerian Perhubungan.

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya.

KETUA RAPAT:

Iya, gimana setuju? Oke, saya ketok lagi.

(RAPAT: SETUJU)

Pak Menteri? Setuju? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

**Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri beserta jajaran yang kami hormati,**

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara Raker pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat.

Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup, kami berikan kesempatan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan sambutan penutup. Silakan Pak.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V
yang saya banggakan,**

Hari ini kita menjalani suatu proses diskusi yang konstruktif, itu tidak lain adalah upaya-upaya kita untuk memaksimalkan anggaran-anggaran yang diberikan amanah pada kami dan lalu mendapatkan masukan dari Bapak. Oleh karenanya, kami sepakat dari Kementerian Perhubungan untuk bersama-sama DPR untuk melaksanakan pembangunan. Dan juga kami akan menyampaikan apabila ada hal yang perlu kami sampaikan. Mohon kiranya berkaitan dengan subsidi angkutan laut, subsidi angkutan udara, subsidi darat dan kereta api itu relatif kurang dan dalam waktu singkat ini kita akan sampaikan ke Kementerian Keuangan dan kami akan laporkan secara langsung kepada Bapak-Ibu sekalian.

Semoga ini juga bisa memberikan ruang ke daerah-daerah terutama di udara, laut juga tol laut dan sebagainya bisa terlaksana dengan baik.

Sekali lagi mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan belum maksimal. Dan kami siap untuk berkoordinasi untuk melaksanakan program pemerintah untuk kejayaan Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah Saudara-Saudara rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan. Semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan bersama dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin.

Dengan mengucapkan *hamdallah*, maka rapat kerja pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.35 WIB)

JAKARTA, 6 Juni 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002